



PDRB

Produk Domestik Regional Bruto

KABUPATEN KENDAL

MENURUT PENGELUARAN

2018-2022





PDRB
Produk Domestik Regional Bruto

KABUPATEN KENDAL
MENURUT PENGELUARAN

2018-2022





**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KABUPATEN KENDAL
MENURUT PENGELUARAN 2018-2022**

ISSN/SSBN: -

Nomor Publikasi: 3324.2306

Katalog BPS: 9302020.3324

Ukuran Buku: 21,5 cm x 29,7 cm

Jumlah halaman: vii + 74 halaman

Naskah:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kendal

Gambar Kulit:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kendal

Diterbitkan Oleh:

©Badan Pusat Statistik Kabupaten Kendal

Dicetak Oleh:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kendal

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik



PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN KENDAL MENURUT PENGELUARAN 2018-2022

ANGGOTA TIM PENYUSUN

Pengarah:

Dra. Ummi Hastuti, M.Si.

Penanggungjawab Umum:

Indriyati, SST, M.Si.

Penyunting:

Tim Penyusun PDRB Pengeluaran

Penulis:

Muktasim Billah, S.ST., M.Stat.

Pengolah Data/Data Processor:

Indriyati, SST, M.Si.

Retabulasi:

Muktasim Billah, S.ST., M.Stat.

Penyusun:

Muktasim Billah, S.ST., M.Stat.

Gambar Kulit/Cover Design:

Muktasim Billah, S.ST., M.Stat.

<https://kendalkab.bps.go.id>



<https://kendalkab.bps.go.id>

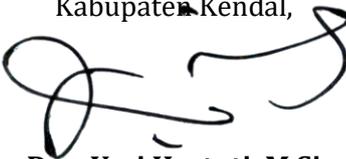


KATA PENGANTAR

Publikasi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kendal Menurut Pengeluaran Tahun 2018-2022 ini merupakan kelanjutan dari penerbitan tahun-tahun sebelumnya yang disusun oleh BPS Kabupaten Kendal. Publikasi ini menyajikan tinjauan perkembangan perekonomian Kendal secara deskriptif. Dalam buku ini juga ditampilkan tabulasi dan infografis PDRB tahun 2018-2022 atas dasar harga berlaku dan harga konstan 2010. Data PDRB dalam publikasi ini menggunakan tahun dasar 2010, serta menerapkan konsep *System of National Accounts 2008* seperti yang direkomendasikan oleh *United Nations*.

Kami mengucapkan terimakasih kepada tim penyusun yang telah mewujudkan publikasi PDRB menurut pengeluaran ini. Kami menyadari bahwa data dan informasi yang disajikan dalam publikasi ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, setiap masukan yang bersifat konstruktif sangat dihargai demi penyempurnaan isi publikasi ini selanjutnya. Semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Kendal, April 2023
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
Kabupaten Kendal,



Dra. Umi Hastuti, M.Si

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
Daftar Grafik	vii
Daftar Lampiran	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	3
B. Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	4
C. Kegunaan Statistik PDRB.....	7
BAB II METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA	9
A. Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PKRT)	11
B. Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRT (PKLNPRT)	14
C. Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PKP)	16
D. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	19
E. Perubahan Inventori	23
F. Ekspor Impor Barang dan Jasa	26
BAB III TINJAUAN PEREKONOMIAN KENDAL BERDASARKAN PDRB PENGELUARAN TAHUN 2018-2022	29
A. Tinjauan Agregat PDRB Kabupaten Kendal menurut Pengeluaran	31
B. Perkembangan Konsumsi Akhir Rumah Tangga	37
C. Perkembangan Konsumsi Akhir LNPRT	42
D. Perkembangan Konsumsi Akhir Pemerintah	43
E. Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	44
F. Perkembangan Perubahan Inventori	46
G. Perkembangan Ekspor Netto Barang dan Jasa	47



BAB IV	PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB MENURUT PENGELUARAN KABUPATEN KENDAL TAHUN 2018-2022	51
	A. PDRB (Nominal)	53
	B. Perbandingan Pengeluaran PDRB untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga Terhadap Ekspor	54
	C. Perbandingan Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap PMTB	56
	D. Proporsi Konsumsi Akhir terhadap PDRB	57
	E. Incremental Capital Output Ratio (ICOR)	58
BAB V	PENUTUP	61
	DAFTAR PUSTAKA	65
	LAMPIRAN	67

<https://kendalkab.bps.go.id>



DAFTAR TABEL

Tabel 1.	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran Tahun 2018-2022 (<i>Miliar Rupiah</i>).....	32
Tabel 2.	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Pengeluaran Tahun 2018-2022 (<i>Miliar Rupiah</i>).....	32
Tabel 3.	Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran Tahun 2018-2022 (<i>Persen</i>)	34
Tabel 4.	Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Pengeluaran Tahun 2018-2022 (<i>Persen</i>)	36
Tabel 5.	Indeks Implisit PDRB menurut Pengeluaran Tahun 2018-2022 (<i>Persen</i>).....	37
Tabel 6.	Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Tahun 2018-2022.....	38
Tabel 7.	Struktur Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Tahun 2018-2022 (<i>Persen</i>).....	39
Tabel 8.	Pertumbuhan Riil Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Tahun 2018-2022 (<i>Persen</i>).....	40
Tabel 9.	Pertumbuhan Indeks Implisit Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Tahun 2018-2022 (<i>Persen</i>)	41
Tabel 10.	Perkembangan Penggunaan Konsumsi LNPRT Tahun 2018-2022.....	42
Tabel 11.	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Tahun 2018-2022.....	43
Tabel 12.	Perkembangan dan Struktur PMTB Tahun 2018-2022.....	45
Tabel 13.	Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Tahun 2018-2022.....	47
Tabel 14.	Perkembangan Ekspor Netto Tahun 2018-2022	49



Tabel 15. Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB Tahun 2018-2022.....	56
Tabel 16. Proporsi Penggunaan Konsumsi Akhir terhadap PDRB Tahun 2018-2022.....	57
Tabel 17. Incremental Capital Output Ratio Tahun 2018-2022.....	58

<https://kendalkab.bps.go.id>



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Perbandingan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Tahun 2018-2022 (Trilyun Rupiah).....	33
Grafik 2. Perbandingan Distribusi PDRB menurut Pengeluaran Tahun 2018-2022 (Persen)	35
Grafik 3. Pertumbuhan Beberapa Komponen Pengeluaran 2018-2022 (Persen)	46
Grafik 4. Grafik 4. Kontribusi dan Pertumbuhan Komponen PDRB Tahun 2022 (persen).....	54
Grafik 5. Perbandingan Pertumbuhan Komponen PDRB Pengeluaran Kabupaten Kendal Tahun 2018-2022.....	55
Grafik 6. Rata-rata Pertumbuhan Komponen PDRB Pengeluaran Tahun 2018-2022 (persen).....	56

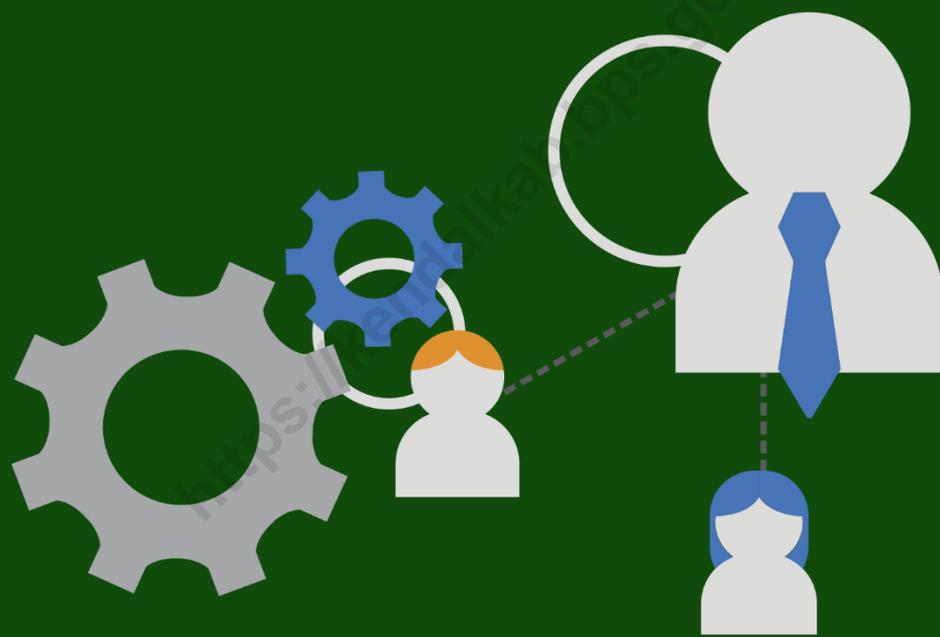


DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran 2018-2022 (<i>Juta Rupiah</i>).....	69
Lampiran 2.	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan menurut Pengeluaran 2018-2022 (<i>Juta Rupiah</i>).....	70
Lampiran 3.	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran 2018-2022 (Persen)	71
Lampiran 4.	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Pengeluaran 2018-2022 (Persen).....	72
Lampiran 5.	Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100) menurut Pengeluaran 2018-2022 (Persen).....	73
Lampiran 6.	Laju Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100) menurut Pengeluaran 2018-2022 (Persen).....	74



<https://kendalkab.bps.go.id>



BAB I

PENDAHULUAN



<https://kendalkab.bps.go.id>



Pendahuluan

A. LATAR BELAKANG

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah/regional dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah/daerah/*region* tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

Penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan produksi dan pendekatan pengeluaran. Penghitungan PDRB dengan pendekatan produksi diperoleh dari selisih nilai barang dan jasa yang dihasilkan dari suatu aktivitas ekonomi, dikurangi dengan bahan baku yang digunakan sebagai input, ditambah pajak atas produk, serta dikurangi subsidi atas produk. PDRB dengan pendekatan produksi ini lebih dikenal dengan istilah PDRB menurut lapangan usaha. PDRB menurut lapangan usaha merupakan gambaran kondisi sisi penawaran (*supply side*) dari suatu ekonomi yang dibedakan menurut beberapa kategori lapangan usaha. Berbeda dengan PDRB sebelumnya, penghitungan PDRB dengan metode baru (SNA 2008), juga telah “merubah” cakupan dan beberapa istilah yang digunakan. Misalnya saja, istilah sektor sekarang diganti menjadi kategori, cakupan yang sebelumnya hanya 9 sektor, sekarang berubah menjadi 17 kategori lapangan usaha.

Sejalan dengan pendekatan produksi, gambaran perekonomian dari sisi permintaan (*demand side*) sudah seharusnya juga tersedia. Gambaran struktur ekonomi dari sisi permintan ini dapat dilakukan dengan cara melakukan penghitungan PDRB menurut pendekatan pengeluaran. Melalui pendekatan pengeluaran, PDRB diperoleh dari penjumlahan seluruh pengeluaran barang dan jasa untuk konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga non profit yang melayani rumah tangga, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan inventori, dan ekspor dikurangi impor barang dan jasa. Selain untuk melihat pertumbuhan ekonomi, PDRB menurut penggunaan juga memperlihatkan komposisi penggunaan/permintaan barang dan jasa, baik yang dihasilkan di dalam atau dari luar wilayah dalam periode tahun tertentu untuk memenuhi permintaan.



Menyadari bahwa penghitungan PDRB dengan menggunakan kedua pendekatan sama pentingnya, maka BPS Kabupaten Kendal melakukan penghitungan PDRB menurut pengeluaran. Penghitungan dilakukan dengan menggunakan tahun dasar (seri 2010), sesuai dengan rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam 2008 *System of National Accounts* (SNA 2008) melalui penyusunan kerangka *Supply and Use Tables* (SUT).

B. PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto atau balas jasa faktor produksi yang dihasilkan di suatu wilayah yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu. Penyusunan PDB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan.

PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal merupakan angka yang menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan. Secara konseptual, PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran struktur perekonomian di suatu wilayah. Sementara itu, PDRB atas dasar harga konstan atau dikenal dengan PDRB riil menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang disusun berdasarkan harga pada tahun dasar tertentu. PDRB atas dasar harga konstan dapat digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dari suatu periode ke periode tertentu.

Terdapat tiga pendekatan yang bisa digunakan dalam menghitung angka-angka PDRB, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran.

1. Pendekatan Produksi

PDRB menurut pendekatan produksi adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu wilayah/daerah/*region* dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan ke dalam beberapa sektor lapangan usaha. Mulai tahun 2015, sebagaimana rekomendasi SNA 2008, pengelompokan sektor lapangan usaha diperluas menjadi 17 kategori lapangan usaha yang dirinci menjadi sub-sub kategori lapangan usaha, yaitu:



1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan,
2. Pertambangan dan Penggalian,
3. Industri Pengolahan,
4. Pengadaan Listrik dan Gas,
5. Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang,
6. Konstruksi,
7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor,
8. Transportasi dan Pergudangan,
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum,
10. Informasi dan Komunikasi,
11. Jasa Keuangan dan Asuransi,
12. Real Estat,
13. Jasa Perusahaan,
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib,
15. Jasa Pendidikan,
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial,
17. Jasa lainnya.

2. Pendekatan Pendapatan

PDRB menurut pendekatan ini merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu wilayah/daerah/*region* dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak atas produksi dan impor dikurangi subsidi).

3. Pendekatan Pengeluaran

PDRB menurut penggunaan disebut juga sebagai PDRB menurut permintaan atau PDRB menurut pengeluaran. Penghitungan PDRB menurut penggunaan menggambarkan bagaimana penggunaan barang dan jasa yang diproduksi oleh berbagai golongan dalam masyarakat. Barang dan jasa yang dimaksud merupakan seluruh barang jadi dan jasa yang diproduksi di suatu daerah/wilayah selama periode waktu tertentu, yang digunakan untuk konsumsi akhir. Yang dimaksud dengan barang



jadi adalah barang yang tidak digunakan untuk diproses kembali oleh suatu industri, tetapi untuk dikonsumsi oleh penduduk. Barang setengah jadi (*intermediate goods*) tidak termasuk dalam penghitungan PDRB menurut penggunaan, karena barang setengah jadi digunakan untuk diproses kembali menjadi barang jadi. Oleh karena itu, nilai barang setengah jadi tersebut sudah termasuk di dalam barang jadi yang dihasilkan.

Dari sisi pengeluaran, besaran PDRB tersusun dari tiga komponen utama, pertama adalah besaran konsumsi, baik konsumsi rumah tangga, pemerintah, maupun lembaga swasta nirlaba; kedua adalah pembentukan modal tetap bruto, dan ketiga adalah net ekspor, yaitu besarnya ekspor dikurangi dengan impornya. Secara lebih detail, PDRB dari sisi pengeluaran, terdiri dari komponen;

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga
2. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto
5. Ekspor Neto (ekspor minus impor)
6. Perubahan Stok

Secara teoritis, total PDRB yang dihitung melalui ketiga pendekatan di atas akan menghasilkan nilai yang sama besar. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. PDRB yang dihasilkan dengan cara ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena di dalamnya sudah dicakup pajak tidak langsung neto. Penghitungan PDRB melalui pendekatan produksi dan atau pendekatan pendapatan akan disajikan dalam bentuk data *PDRB menurut Lapangan Usaha*, sedangkan melalui pendekatan pengeluaran disajikan dalam bentuk data *PDRB menurut Penggunaan*. Sebagaimana judulnya, publikasi ini membahas PDRB pengeluaran dengan menggunakan tahun dasar baru (2010) agar dapat mencerminkan struktur ekonomi terkini secara lebih baik.



C. KEGUNAAN STATISTIK PDRB

Data pendapatan regional adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian nasional setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain adalah:

1. PDRB harga berlaku nominal menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah/daerah/*region*. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.
2. PDRB harga konstan dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, atau setiap sektor, dari tahun ke tahun.
3. Distribusi PDRB harga berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu wilayah/daerah/*region*. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah/daerah/*region*.
4. PDRB harga berlaku menurut pengeluaran dapat menunjukkan produk barang dan jasa yang digunakan untuk tujuan konsumsi akhir, investasi dan diperdagangkan dengan pihak luar negeri/luar wilayah.
5. Distribusi PDRB menurut pengeluaran menunjukkan peranan institusi dalam menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi.
6. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk.
7. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah.



BAB II

METODE ESTIMASI DAN

SUMBER DATA



Metode Estimasi dan Sumber Data

A. PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA (PKRT)

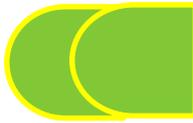
1. Konsep, Definisi dan Cakupan

Sektor rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan konsumsi rumah tangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumah tangga juga berperan sebagai produsen dan penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh institusi lain.

Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (PKRT) adalah pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, dapat memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama.

PKRT mencakup seluruh pengeluaran atas barang dan jasa oleh residen suatu wilayah, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu *region*. Jenis-jenis barang dan jasa yang dikonsumsi diklasifikasikan menurut COICOP (*Classifications of Individual Consumption by Purpose*) seperti yang direkomendasikan oleh UN (United Nations), sebagai berikut:

1. Makanan dan minuman tidak beralkohol
2. Minuman beralkohol, tembakau dan narkotik
3. Pakaian dan alas kaki
4. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya
5. Furniture, perlengkapan rumahtangga dan pemeliharaan rutin
6. Kesehatan
7. Angkutan
8. Komunikasi
9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan
10. Pendidikan
11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel
12. Barang dan jasa lainnya



Namun karena keterbatasan data, maka dalam penyajian di publikasi ini, 12 (dua belas) COICOP tersebut dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) COICOP, yaitu:

1. Makanan, Minuman, dan Rokok
2. Pakaian dan Alas Kaki
3. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga
4. Kesehatan dan Pendidikan
5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya
6. Hotel dan Restoran
7. Lainnya

Konsumsi rumah tangga mencakup juga hal-hal sebagai berikut:

- Imputasi jasa persewaan rumah milik sendiri (*owner occupied dwellings*);
- Nilai perkiraan sewa rumah milik sendiri harus diperhitungkan karena rumah tangga pemilik, dianggap menghasilkan jasa persewaan rumah bagi dirinya sendiri. Imputasi sewa rumah diperkirakan atas dasar harga pasar, meskipun status rumah tersebut milik sendiri. Apabila rumah tangga benar-benar menyewa, maka yang dihitung adalah biaya sewa yang dibayar, baik dibayar penuh maupun tidak penuh karena mendapat keringanan biaya (subsidi atau transfer).
- Barang yang diproduksi dan digunakan sendiri;
- Pemberian/hadiah dalam bentuk barang yang diterima dari pihak lain;
- Barang dan jasa yang dibeli langsung (*direct purchase*) oleh residen di luar wilayah atau di luar negeri (diperlakukan sebagai impor)

Terdapat beberapa catatan yang perlu diketahui berkaitan dengan PKRT ini, yaitu:

- Pembelian langsung oleh non-residen, diperlakukan sebagai ekspor dari wilayah tersebut)
- Pembelian barang yang tidak diproduksi kembali (diduplikasi), seperti barang antik, lukisan, dan hasil karya seni lainnya diperlakukan sebagai investasi atas barang berharga, bukan konsumsi rumah tangga.
- Pengeluaran rumah tangga untuk keperluan biaya antara dan pembentukan modal di dalam aktivitas usaha rumah tangga, tidak termasuk dalam pengeluaran konsumsi rumah tangga. Contoh, pembelian barang dan jasa untuk keperluan usaha, perbaikan besar rumah, dan pembelian rumah.



- Pengeluaran untuk keperluan transfer baik dalam bentuk uang atau barang, tidak termasuk sebagai pengeluaran konsumsi rumah tangga.

2. Metode Penghitungan

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi PKRT adalah:

- Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, dalam bentuk pengeluaran konsumsi per-kapita seminggu untuk makanan, dan pengeluaran per-kapita sebulan untuk kelompok bukan makanan,
- Jumlah penduduk pertengahan tahun dari BPS,
- Data Sekunder (dari BPS maupun dari luar BPS), dalam bentuk data atau indikator suplai komoditas dari jenis pengeluaran tertentu,
- Indeks Harga Konsumen (IHK).
- Penghitungan PKRT didasarkan pada hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Untuk menghasilkan perhitungan PKRT yang mencerminkan kondisi sesungguhnya, masih diperlukan adanya beberapa penyesuaian (*adjustment*). Penyesuaian dilakukan dengan menggunakan data pendukung (data sekunder) dalam bentuk indikator suplai (di luar Susenas) dari beberapa komoditi tertentu. Hasil penghitungan dari data sekunder tersebut dianggap lebih mencerminkan PKRT yang sebenarnya. Penyesuaian (*adjustment*) yang dilakukan adalah mengganti hasil Susenas dengan hasil penghitungan yang didasarkan data indikator suplai untuk beberapa komoditas. Penggantian dilakukan pada level komoditas, kelompok komoditas, atau jenis pengeluaran tertentu.

Langkah penghitungan di atas, menghasilkan besarnya PKRT adh Berlaku. PKRT adh Konstan 2010, diperoleh dengan cara men-*deflate* PKRT adh Berlaku dengan IHK tahun dasar 2010.

Untuk lebih jelasnya, langkah-langkah penghitungan PKRT dapat diringkas sbb:

1. Estimasi PKRT hasil Susenas:
 - a. Makanan = pengeluaran konsumsi per kapita seminggu x (30/7) x 12 x jumlah penduduk pertengahan tahun
 - b. Bukan makanan = pengeluaran konsumsi per kapita sebulan x 12 x jumlah penduduk pertengahan tahun



2. Terhadap data poin ke 1 dilakukan koreksi dengan menggunakan data sekunder atau indikator suplai komoditas untuk jenis pengeluaran tertentu;
3. Data poin ke 2 dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) kelompok COICOP,
4. Diperoleh nilai PKRT tahun 2010 yang telah di-*adjust*;
5. Susun Indeks Implisit berdasarkan IHK Kota (Provinsi/Kota terdekat) dan 7 kelompok COICOP ;
6. PKRT adh konstan 2010 diperoleh dengan membagi hasil poin ke 4 dengan hasil poin ke 5.

B. PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LNPRT (PKLNPRT)

1. Konsep, Definisi dan Cakupan

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri dalam suatu perekonomian wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggotanya maupun bagi rumah tangga secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tidak berarti secara ekonomi artinya harga tersebut biasanya dibawah harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

LNPRT merupakan bagian dari lembaga non profit (LNP). Sesuai dengan fungsinya, LNP dibedakan atas LNP yang melayani rumah tangga dan LNP yang melayani bukan rumah tangga.

Karakteristik unit LNP adalah sebagai berikut:

- LNP umumnya adalah lembaga formal, tetapi terkadang merupakan lembaga informal yang keberadaannya diakui oleh masyarakat;
- pengawasan terhadap jalannya organisasi dilakukan oleh anggota terpilih yang punya hak sama, termasuk hak bicara atas keputusan lembaga;
- setiap anggota mempunyai tanggung jawab tertentu dalam organisasi, dan tidak berhak menguasai *profit* atau surplus, karena *profit* yang diperoleh dari kegiatan usaha produktif dikuasai oleh lembaga;
- kebijaksanaan lembaga diputuskan secara kolektif oleh anggota terpilih, dan kelompok ini berfungsi sebagai pelaksana dari dewan pengurus; dan
- istilah *nonprofit* tidak berarti bahwa lembaga ini tidak dapat menciptakan surplus melalui kegiatan produktifnya, namun surplus yang diperoleh biasanya



diinvestasikan kembali pada aktivitas sejenis.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggotanya atau rumah tangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota dari lembaga yang dimaksud di sini adalah yang bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 (tujuh) jenis lembaga, yaitu: Organisasi kemasyarakatan, Organisasi sosial, Organisasi profesi, Perkumpulan sosial/kebudayaan/olahraga/hobi, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga keagamaan, dan Organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

Nilai Pengeluaran Konsumsi LNPRT (PKLNPR) sama dengan nilai output non-pasar yang dihasilkan LNPRT. Nilai output non pasar tersebut dihitung berdasarkan nilai seluruh pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasionalnya. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari:

- a. Konsumsi antara, contoh: pembelian alat tulis, barang cetakan; pembayaran listrik, air, telepon, teleks, faksimili; biaya rapat, seminar, perjamuan, transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas, belanja barang dan jasa lain, sewa gedung, sewa perlengkapan kantor dan lain-lain.
- b. Kompensasi tenaga kerja, contoh: upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lainnya
- c. Penyusutan
- d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN dan lain-lain.

2. Metode Penghitungan

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi PKLNPR adalah :

- Hasil Survei Khusus Lembaga Non-profit (SKLNP).
- Informasi yang diperoleh dari hasil SKLNP adalah rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran.
- Hasil *up-dating* direktori LNPRT.
- Informasi yang diperoleh dari hasil *up-dating* direktori LNPRT adalah jumlah populasi LNPRT menurut jenis lembaga.
- Indeks Harga Konsumen (IHK)

PKLNPR diestimasi dengan menggunakan metode langsung, yaitu menggunakan hasil Survei Khusus Lembaga Non Profit (SKLNP). Tahapan estimasi PKLNPR adalah sebagai berikut :



- a. Menghitung rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran (barang dan jasa). Barang dan jasa yang diperoleh secara cuma-cuma, nilainya diperkirakan sesuai harga pasar yang berlaku. Rata-rata pengeluaran lembaga menurut jenisnya dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\bar{x}_{ij} = \frac{x_{ij}}{n_i}$$

\bar{x}_{ij} : Rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

x_{ij} : PKLNPRT hasil survei menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

n_i : Jumlah sampel LNPRT menurut jenis lembaga

i : Jenis lembaga LNPRT, $i = 1, 2, 3, \dots, 7$

j : jenis pengeluaran LNPRT, $j = 1, 2, 3, \dots, 19$

- b. Mengestimasi PKLNPRT, dengan menggunakan rumusan sebagai berikut:

$$X = \sum_{i=1}^7 \sum_{j=1}^{19} \bar{x}_{ij} \times N_i$$

X : PKLNPRT adh Berlaku

N_i : Populasi LNPRT menurut jenis lembaga

Hasil penghitungan di atas akan diperoleh besarnya PKLNPRT adh Berlaku. PKLNPRT adh Konstan 2010, diperoleh dengan cara *men-deflate* PKLNPRT adh Berlaku dengan IHK tahun dasar 2010.

C. PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH (PKP)

1. Konsep, Definisi dan Cakupan

Unit pemerintah adalah unit institusi yang dibentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang lembaga legislatif, yudikatif maupun eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas wilayah suatu negara/wilayah. Pemerintah juga mempunyai berbagai peran dan fungsi lainnya, seperti sebagai



penyedia barang dan jasa bagi kelompok atau individu rumah tangga, sebagai pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lainnya, berfungsi mendistribusikan pendapatan atau kesejahteraan melalui aktivitas transfer, serta terlibat di dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah bisa berperan sebagai konsumen maupun produsen, serta sebagai regulator yang menetapkan berbagai kebijakan di bidang fiskal dan moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi atas barang dan jasa akhir. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah akan melakukan aktivitas memproduksi barang dan jasa maupun aktivitas investasi.

Besarnya nilai pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) sama dengan nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah untuk dikonsumsi pemerintah itu sendiri. PKP mencakup pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran upah dan gaji pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, dan nilai output dari Bank Indonesia, dikurangi dengan nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan unit produksi yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan.

Aktivitas unit produksi pemerintah yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan secara umum, mencakup kegiatan sebagai berikut:

- a. Memproduksi barang yang sama atau sejenis dengan barang yang diproduksi oleh perusahaan. Contoh, aktivitas pencetakan publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, pembibitan tanaman di kebun percobaan dsb. Aktivitas menjual barang-barang semacam itu bersifat insidental dari fungsi pokok unit pemerintah.
- b. Memproduksi jasa. Contoh, aktivitas penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah memungut biaya yang umumnya tidak lebih dari seluruh biaya yang dikeluarkan. Pendapatan yang diterima dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditi (pendapatan jasa).

Sektor pemerintahan terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, unit pemerintah pusat akan mengacu pada dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan unit pemerintah daerah



(baik Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun Desa) mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah (APBD).

Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) Kabupaten mencakup PK-Pemerintah Provinsi yang merupakan bagian dari Pemerintah Kabupaten; PK-Pemerintah Kabupaten yang bersangkutan; PK-Pemerintah Pusat yang merupakan bagian dari pemerintah Kabupaten; dan PK-Pemerintah Desa/Kelurahan/Nagari yang ada di wilayah Kabupaten bersangkutan.

2. Metode Penghitungan

Data dasar yang digunakan untuk menghitung PK-P Kabupaten Tahunan adalah:

- Data realisasi APBN Tahunan (Kemenkeu)
- Data realisasi APBD Tahunan (Kemenkeu)
- Statistik Keuangan Daerah (BPS)
- Output Bank Indonesia (BI)
- Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Kementerian Keuangan serta Indeks Harga dari BPS.

a. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Kabupaten adh Berlaku

Secara umum, PK-P adh Berlaku dihitung menggunakan rumusan berikut:

$$\text{PK-P adh Berlaku} = \text{Output non pasar-penjualan barang dan jasa} + \text{Output Bank Indonesia}$$

Output non-pasar dihitung dengan pendekatan biaya yang dikeluarkan, yaitu: Belanja pengadaan barang/jasa, bantuan sosial dalam bentuk barang (yang dibeli dengan harga pasar), belanja pegawai, dan penyusutan.

Untuk level Kabupaten, PK-P Kabupaten adh Berlaku dihitung berdasarkan penjumlahan dari pengeluaran akhir konsumsi pemerintah Kabupaten itu sendiri + pengeluaran akhir seluruh pemerintah desa/kelurahan/nagari yang ada di wilayah kabupaten tersebut + pengeluaran pemerintah Pusat yang menjadi bagian dari kabupaten yang bersangkutan.



b. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Kabupaten adh Konstan

Pengeluaran konsumsi pemerintah adh Konstan dihitung dengan menggunakan metode deflasi. Deflator yang digunakan adalah Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) umum tanpa ekspor, Indeks Upah, Indeks Implisit dari Produk Domestik Bruto komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Indeks Harga Konsumen (IHK) umum.

D. PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)

1. Konsep, Definisi dan Cakupan

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor utama yang akan mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara/wilayah. Investasi di sini terdiri dari investasi fisik dan investasi finansial. Dalam konteks PDB/PDRB, aktivitas investasi fisik ini tercermin pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori.

PMTB erat kaitannya dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang dilibatkan dalam proses produksi. Secara garis besar aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal seperti: bangunan dan konstruksi lain, mesin dan perlengkapan, kendaraan, tumbuhan, ternak, dan barang modal lainnya.

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi, dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal), dan pertumbuhan aset sumberdaya hayati yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, dan sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta akan mengalami penyusutan sepanjang usia pakainya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya masih mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal yang digunakan dalam proses produksi secara normal selama satu periode.



PMTB terdiri dari:

- a. Penambahan dikurangi pengurangan aset (harta) baik barang baru maupun barang bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan lainnya, mesin & perlengkapan, alat transportasi, aset tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*), dan sebagainya;
- b. Biaya alih kepemilikan aset non-finansial yang tidak diproduksi, seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
- c. Perbaikan besar aset, yang bertujuan meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakainya (seperti overhaul mesin produksi; reklamasi pantai; pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan; serta pencegahan banjir dan erosi).

2. Metode Penghitungan

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi PMTB adalah :

- Output industri konstruksi hasil penghitungan PDRB menurut industri konstruksi dari BPS Provinsi/Kabupaten/Kota.
- Nilai impor 2 digit HS, yang merupakan barang modal impor dari KPPBC (Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai) setempat.
- Indeks Produksi Industri Besar Sedang dari Statistik Industri Kecil dan Rumah tangga (level provinsi).
- Laporan keuangan perusahaan.
- Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang level provinsi.
- IHPB dari Statistik Harga Perdagangan Besar.
- Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalan (migas dan non-migas).
- Publikasi Statistik Listrik, Gas dan Air Minum.
- Publikasi Statistik Konstruksi.
- Data Eksplorasi Mineral dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
- Statistik Peternakan, Ditjen Peternakan.

Penghitungan PMTB dapat dilakukan melalui metode langsung maupun tidak langsung, tergantung pada ketersediaan data yang mungkin diperoleh di wilayah masing-masing. Pendekatan “langsung” adalah dengan cara menghitung pembentukan



modal (harta tetap) yang dilakukan oleh berbagai sektor ekonomi (produsen) secara langsung. Sedangkan pendekatan “tidak langsung” adalah dengan menghitung berdasarkan alokasi dari total penyediaan produk (barang dan jasa) yang menjadi barang modal di berbagai industri, atau disebut sebagai pendekatan “ arus komoditas”. Dalam hal ini penyediaan atau “supply” dari barang modal dapat berasal dari produksi dalam negeri (domestik) maupun dari produk luar negeri (impor).

Pendekatan Langsung

Penghitungan PMTB secara langsung dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai PMTB yang terjadi di setiap industri (lapangan usaha). Barang modal tersebut dinilai atas dasar harga (adh) pembelian, di dalamnya sudah termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan, seperti biaya transportasi, biaya instalasi, pajak-pajak, serta biaya lain yang terkait dengan pengadaan barang modal tersebut. Bagi barang modal yang berasal dari impor di dalamnya termasuk bea masuk dan pajak-pajak yang terkait dengan pengadaan atau alih kepemilikan barang modal tersebut.

Pada dasarnya data untuk penghitungan PMTB secara langsung dapat diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Data yang tersedia meliputi informasi/data tentang perubahan atas aset tetap (PMTB) yang dinilai adh berlaku atau harga pembelian (perolehan). Untuk memperoleh nilai PMTB adh Konstan, maka PMTB adh Berlaku tersebut di “deflate” (dibagi) dengan indeks harga perdagangan besar (IHPB) yang sesuai dengan kelompok barang modal.

Pendekatan Tidak Langsung

Penghitungan PMTB dengan cara tidak langsung, disebut sebagai pendekatan arus komoditas (*commodity flow approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menghitung nilai penyediaan produk barang yang dihasilkan oleh berbagai industri (*supply*), yang kemudian sebagian di antaranya dialokasi menjadi barang modal. Penghitungan PMTB dalam bentuk bangunan, dilakukan dengan menggunakan rasio tertentu dari nilai output industri konstruksi, baik adh Berlaku maupun adh Konstan.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lainnya dibedakan atas barang modal yang berasal dari produksi domestik, dan yang berasal dari impor. Untuk barang modal domestik, dapat diperoleh dengan dua cara. Pertama, dengan mengalokasi output mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang menjadi pembentukan modal. Nilai tersebut masih harus ditambah dengan biaya angkut



dan margin perdagangan, sehingga diperoleh PMTB adh Berlaku. Untuk memperoleh nilai adh Konstan adalah dengan men-*deflate* PMTB (adh Berlaku) dengan IHPB yang sesuai dengan jenis barang modal.

Pendekatan ke dua, yang harus dilakukan bila data output tidak tersedia adalah dengan cara “ekstrapolasi” atau mengalikan PMTB adh Konstan dengan indeks produksi jenis barang modal yang sesuai. Untuk itu penghitungan PMTB diawali dengan menghitung PMTB adh Konstan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk memperoleh PMTB adh Berlaku, nilai PMTB adh Konstan tersebut di “*reflate*” (dikalikan) dengan indeks harga masing-masing jenis barang modal yang sesuai (sebagai inflator). Hal ini mensyaratkan bahwa PMTB adh Konstan di tahun-tahun sebelumnya sudah tersedia secara lengkap.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang berasal dari impor, dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) cara.

Pertama, PMTB adh Berlaku diperoleh dari total nilai barang impor. Selanjutnya, barang modal tersebut dirinci menurut kelompok utama seperti mesin-mesin, alat angkutan dan barang modal lain. Apabila rincian tersebut tidak tersedia dapat digunakan rasio tertentu sebagai alokator (barang modal impor kode HS 2 digit). **Kedua**, untuk memperoleh PMTB adh Konstan adalah dengan cara men-“*deflate*” PMTB adh Berlaku dengan menggunakan indeks harga yang sesuai.

PMTB adh Berlaku untuk barang modal tak-berwujud seperti eksplorasi mineral, dihitung dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang industri pertambangan. Dengan menggunakan data panel, pertumbuhan adh Berlaku dari aktivitas pertambangan itu menjadi pengali nilai eksplorasi mineral pada periode sebelumnya. Sedangkan PMTB adh Konstannya diperoleh dengan men-*deflate* nilai adh Berlaku dengan indeks implisit dari PDRB industri pertambangan. Selain itu, data dari ESDM dan BP Migas diharapkan menjadi dasar atau data kontrol untuk data tahunannya.

Untuk perangkat lunak, PMTB adh Berlaku diperoleh dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang software. Untuk adh Konstan diperoleh dengan men-*deflate* nilai adh Berlaku dengan indeks implisit industri jasa perusahaan.

Penghitungan PMTB hasil karya hiburan, sastra, dan seni original (*entertainment, literary, or artistic original products*), data yang dikumpulkan antara lain nilai sinetron dan program acara televisi yang dapat dibuat. Sedangkan data Impor film diperoleh dari



nilai impor film. PMTB adh Konstannya diperoleh dengan cara men-*deflate* nilai adh Berlaku dengan indeks implisit industri jasa hiburan dan IHPB barang impor.

Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam penghitungan PMTB melalui pendekatan tak-langsung (arus komoditas), yaitu:

- a. Rasio penggunaan output industri yang menjadi barang modal cenderung statis. Untuk memperbaiki diperlukan survei dalam skala yang besar.
- b. Nilai margin perdagangan dan angkutan (*Trade and Transport Margin*) sulit diperoleh.
- c. Selang (*Lag*) waktu antara data tahun pengukuran (referensi) dengan data publikasi yang diperoleh dari sumber data tertentu, terlalu lama.

E. PERUBAHAN INVENTORI

1. Konsep, Definisi dan Cakupan

Dalam aktivitas ekonomi, inventori berfungsi sebagai salah satu komponen yang dibutuhkan untuk keberlangsungan proses produksi, disamping tenaga kerja dan barang modal. Dalam PDB/PDRB, komponen Perubahan Inventori merupakan bagian dari Pembentukan Modal Tetap Bruto, atau yang lebih dikenal sebagai investasi fisik yang terjadi pada kurun waktu tertentu di dalam suatu wilayah. Perubahan inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong pada satu periode tertentu. Ketersediaan data perubahan inventori menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

Pengertian sederhana dari inventori (persediaan) adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang dalam bentuk lain, yang mempunyai nilai ekonomi maupun nilai manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian ini adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh pihak produsen.

Perubahan inventori adalah selisih antara nilai inventori pada akhir periode akuntansi dengan nilai inventori pada awal periode akuntansi. Perubahan inventori menjelaskan tentang perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna pertambahan (tanda positif) atau pengurangan (bertanda negatif).



Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan proses produksi, sehingga perlu pencadangan baik dalam bentuk bahan baku atau bahan penolong. Ketidakpastian yang disebabkan pengaruh eksternal juga menjadi faktor pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih dipengaruhi oleh unsur spekulatif dengan harapan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Sedangkan bagi pemerintah, kebijakan pencadangan khususnya komoditas strategis utamanya ditujukan untuk menjaga stabilitas ekonomi, politik dan sosial. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas (publik), maka perlu ada pencadangan untuk beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, terigu, minyak goreng dan gula pasir. Bagi rumah tangga, pengadaan inventori lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsinya saja.

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang adalah sebagai berikut :

- a. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
- b. Berbagai jenis bahan baku dan penolong (*material & supplies*), yaitu semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
- c. Barang jadi, yaitu barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan, termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
- d. Barang setengah jadi, yaitu barang-barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai).
- e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang besar maupun pedagang eceran untuk tujuan dijual;
- f. Ternak untuk tujuan dipotong;
- g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau dipakai sebagai bahan bakar atau persediaan; dan
- h. Persediaan pada pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.



2. Metode Penghitungan

Sumber data yang digunakan untuk penghitungan komponen perubahan inventori adalah:

- Laporan keuangan perusahaan-perusahaan terkait, dari survei atau dari mengunduh *website* Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id);
- Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD
- Data komoditas pertambangan dari publikasi statistik pertambangan dan penggalan;
- Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang.
- Data komoditas perkebunan;
- Indeks harga implisit PDRB industri terpilih, dan
- Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih.
- Data eksternal lain, seperti data persediaan beras dari Bulog, data semen dari Asosiasi Semen Indonesia (ASI), gula dari Dewan Gula Indonesia (DGI), dan ternak dari Dirjen Peternakan Kementerian Pertanian.

Terdapat 2 (dua) metode yang digunakan dalam penghitungan komponen perubahan inventori, yaitu pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung. Pendekatan langsung adalah pendekatan dari sisi “korporasi”, sedangkan pendekatan tidak langsung adalah pendekatan dari sisi “komoditas”.

Dilihat dari sisi manfaatnya, pendekatan secara langsung menghasilkan data yang relatif lebih baik dibanding dengan pendekatan tidak langsung. Pendekatan komoditas hanya dapat dilakukan jika data posisi inventori tersedia secara rinci dan berkesinambungan.

Pendekatan Langsung

Dengan menggunakan pendekatan langsung, akan diperoleh nilai posisi inventori di suatu waktu tertentu (umumnya di akhir tahun). Sumber data utama adalah laporan neraca akhir tahun (*balance sheet*) perusahaan. Untuk memperoleh nilai perubahan inventori *adh Berlaku*, diperlukan data inventori di tahun yang berurutan. Langkah penghitungan inventori dari laporan keuangan, adalah sebagai berikut :

- menghitung posisi inventori *adh Konstan*, dengan cara *men-deflate* stok awal dan akhir dengan IHPB akhir tahun;
- menghitung perubahan inventori *adh Konstan* dengan mengurangi posisi di



tahun berjalan dengan di tahun sebelumnya; dan

- menghitung perubahan inventori adh Berlaku dengan meng-*inflate* perubahan inventori adh Konstan dengan IHPB rata-rata tahunan.

Pendekatan Tidak Langsung

Pendekatan tidak langsung disebut juga dengan pendekatan arus komoditas (*commodity flow*). Data utama yang digunakan adalah data volume dan harga masing-masing barang inventori. Nilai perubahan barang inventori adh Berlaku diperoleh dengan cara menghitung perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan rata-rata harga pembelian, atau harga penjualan, bila data harga pembelian tidak tersedia. Perubahan barang inventori adh Konstan dihitung dengan: a. men-*deflate* nilai perubahan inventori adh Berlaku dengan indeks harga yang sesuai, b. mengalikan perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan dengan harga barang di tahun dasar.

Keterbatasan dan masalah yang dihadapi di dalam menghitung komponen Perubahan Inventori adalah:

- Data inventori yang dibutuhkan adalah dalam bentuk posisi atau pada satu saat untuk periode waktu yang berurutan;
- Tidak seluruh komoditas inventori tersedia data volume dan harganya;
- Data perubahan inventori yang tersedia dalam bentuk volume umumnya tidak disertai data harganya. Jika data harga inventori tidak tersedia, maka dapat diasumsikan indeks harga komoditas inventori mengikuti indeks implisit PDRB yang sesuai;
- Diperlukan *adjustment* dengan cara me-*mark-up*, untuk melengkapi estimasi untuk industri yang datanya tidak tersedia.

F. EKSPOR IMPOR BARANG DAN JASA

1. Konsep, Definisi dan Cakupan

Aktivitas ekspor-impor dalam suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintah. Ragam barang dan jasa yang diproduksi serta disparitas harga, menjadi faktor utama munculnya aktivitas ekspor impor. Daerah yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri berusaha



mendatangkan dari daerah atau bahkan negara lain. Di sisi lain, daerah yang memproduksi barang dan jasa melebihi dari kebutuhan domestik, terdorong untuk memperluas pasar ke luar daerah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas barang dan jasa semakin meningkat dan beragam. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus distribusi barang dan jasa. Kondisi tersebut semakin mendorong aktivitas ekspor-impor di suatu wilayah menjadi semakin berkembang.

Ekspor-impor di suatu wilayah didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (baik penjualan/pembelian, barter, hadiah ataupun hibah) atas barang dan jasa antara residen wilayah tersebut dengan non-residen yang berada di luar wilayah tersebut.

Ekspor-Import pada suatu wilayah terdiri dari:

- a. Ekspor/impor barang dari/ke Luar Negeri ke/dari provinsi/kab/kota tersebut
- b. Ekspor/impor jasa dari/ke Luar Negeri ke/dari provinsi/kab/kota tersebut
Cakupan jasa meliputi jasa pengangkutan, asuransi, komunikasi, pariwisata, dan jasa lainnya
- c. Net Ekspor antar daerah
 - Ekspor antar daerah
 - Impor antar daerah

2. Metode Penghitungan

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi ekspor impor adalah :

- Data Statistik Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dari BPS (dalam US\$)
- Data Statistik Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dari BPS (dalam US\$)
- Neraca Pembayaran Indonesia dari Bank Indonesia
- Laporan Simopel, yaitu laporan (bulanan) bongkar muat barang di pelabuhan;
- Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi di jembatan timbang;
- Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi dari hasil survei.
- Kurs transaksi rata-rata tertimbang dari Bank Indonesia

Ekspor-Import barang luar negeri dinilai menurut harga *free on board* (fob) dalam US\$. Penghitungan ekspor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PEB) dengan kurs transaksi beli rata-rata tertimbang. Sedangkan Impor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PIB) dengan kurs



transaksi jual rata-rata tertimbang. Nilai ekspor-impor jasa berasal dari Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Disamping itu, nilai ekspor-impor tersebut masih ditambah/dikurangi dengan nilai pembelian langsung (*direct purchase*) dan transaksi yang tidak terdokumentasi (*undocumented trasnsaction*) baik oleh residen maupun non residen. Sedangkan net ekspor antar wilayah merupakan nilai sisa (residu) antara PDRB lapangan usaha dengan PDRB pengeluaran.

<https://kendalkab.bps.go.id>



BAB III
TINJAUAN PEREKONOMIAN KENDAL
BERDASARKAN PDRB PENGELUARAN
TAHUN 2018-2022



Tinjauan Ekonomi Kabupaten Kendal

Perubahan struktur ekonomi Kabupaten Kendal sebagai wujud proses pembangunan ekonomi tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal lebih dipengaruhi oleh perkembangan maupun perubahan perilaku masing-masing komponen pengeluaran akhir. Sedangkan faktor eksternal banyak dipengaruhi oleh perubahan teknologi dan struktur perdagangan global sebagai akibat peningkatan perdagangan internasional.

Data yang ada menunjukkan bahwa setiap komponen pengeluaran mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia di wilayah domestik Kabupaten Kendal digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (Rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah). Sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik (dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori). Untuk lebih jelasnya, perilaku masing-masing komponen pengeluaran itu akan diuraikan pada bagian berikut.

A. TINJAUAN AGREGAT PDRB KABUPATEN KENDAL MENURUT PENGELUARAN

Nilai total PDRB atas dasar harga berlaku selama lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2022 sebesar Rp. 49.705,16 milyar, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp. 45.164,80 milyar, selengkapnya disajikan pada Tabel 1.

PDRB menurut pengeluaran, selain dinilai atas harga berlaku, juga dinilai atas dasar harga konstan 2010. Perhitungan nilai PDRB ADHK 2010 menggunakan dasar harga berbagai produk yang dinilai dengan harga pada tahun 2010. Melalui pendekatan perhitungan ADHK, PDRB di masing-masing tahun dapat memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau secara kuantitas atau riil (tanpa ada pengaruh perubahan harga).



**Tabel 1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran
Tahun 2018-2022 (Miliar Rp)**

Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	23.488,89	25.191,56	25.246,21	26.115,63	28.664,31
2. Konsumsi LNPRT	378,15	429,72	427,22	446,44	499,40
3. Konsumsi Pemerintah	2.077,52	2.172,54	2.074,34	2.138,40	2.178,48
4. PMTB	11.584,72	12.646,18	11.760,18	12.587,74	13.363,36
5. Perubahan Inventori	542,24	406,58	447,83	408,28	511,24
6. Net Ekspor	1.477,47	1.704,12	2.630,41	3.468,31	4.488,36
PDRB PENGELUARAN	39.548,99	42.550,71	42.586,19	45.164,80	49.705,16

Catatan:

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

PDRB komponen pengeluaran ADHK menggambarkan perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara nominal, utamanya berkaitan dengan peningkatan volume konsumsi akhir. Selama kurun waktu 2018–2022, gambaran tentang perkembangan ekonomi Kabupaten Kendal berdasarkan PDRB ADHK dapat dilihat pada Tabel 2.

**Tabel 2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Pengeluaran
Tahun 2018-2022 (Miliar Rupiah)**

Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	16.603,99	17.381,02	17.300,93	17.581,17	18.452,18
2. Konsumsi LNPRT	247,59	274,59	268,59	271,95	285,21
3. Konsumsi Pemerintah	1.278,61	1.330,33	1.275,33	1.285,79	1.288,01
4. PMTB	7.941,11	8.343,58	7.758,58	8.220,63	8.453,12
5. Perubahan Inventori	241,33	219,77	300,08	221,45	270,63
6. Net Ekspor	2.933,03	3.367,10	3.545,52	4.051,30	4.682,21
PDRB PENGELUARAN	29.245,66	30.916,39	30.449,02	31.632,28	33.431,36

Catatan:

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara



Laju pertumbuhan PDRB terus mengalami peningkatan dengan pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan arah positif. Peningkatan ekonomi tersebut digambarkan melalui Nilai PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan (ADHK), serta pertumbuhan pada total PDRB.

Kondisi perekonomian Kabupaten Kendal tahun 2022 menunjukkan tanda pertumbuhan yang membaik, sejak pandemi yang melanda dunia akhir tahun 2019 dan mulai masuk Indonesia awal tahun 2020 yang lalu, berdampak signifikan pada kinerja ekonomi Kendal, dimana nilai pertumbuhan ekonomi Kendal tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -1,51 persen, hal ini dialami semua wilayah di Jawa Tengah. Penanganan pandemi Covid19 yang gencar dilakukan dengan pemberian vaksin dosis 1, 2 dan 3 (booster) dengan target 70 persen penduduk berdampak pada makin menurunnya kasus Covid19, sehingga pemulihan ekonomi perlahan namun pasti mulai menunjukkan perbaikan yang signifikan pada berbagai komponen dan tahun 2021 dan 2022 pertumbuhan ekonomi kembali meningkat atau tumbuh masing-masing sebesar 3,89 persen dan 5,69 persen.

Grafik 1. Perbandingan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Tahun 2018-2022 (Trilyun Rupiah)



Nilai PDRB Kabupaten Kendal atas dasar harga berlaku selama periode tahun 2018 sampai dengan 2022 menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, begitu pula dengan nilai PDRB atas dasar harga konstan dengan pertumbuhan rata-rata diatas 5 persen, kecuali pada tahun 2020 dimana pandemi Covid19 melanda yang berdampak



pada penurunan kinerja ekonomi Kendal dan wilayah lain di Jawa Tengah. Peningkatan nilai tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan harga dan juga perubahan volume pada setiap komponen PDRB.

Dari Grafik 1, terlihat bahwa nilai PDRB atas dasar harga berlaku lebih besar dari nilai PDRB atas dasar harga konstan. Perbedaan tersebut disebabkan karena ada pengaruh perubahan harga dalam perhitungan PDRB atas dasar harga berlaku, yang menggunakan harga tahun berjalan, sehingga mencerminkan kondisi nilai nominal pada tahun tersebut. Dalam PDRB ADHK harga yang digunakan adalah harga konstan tahun 2010 yang merupakan nilai riil sehingga pengaruh perubahan harga tidak diperhitungkan.

Terbentuknya keseluruhan PDRB atau total PDRB merupakan kontribusi dari semua komponen pengeluarannya, yang terdiri dari konsumsi akhir rumah tangga (PKRT), konsumsi akhir LNPRT (PKLNPRT), konsumsi akhir pemerintah (PKP), pembentukan modal tetap bruto (PMTB), perubahan inventoi, dan ekspor netto (E) atau ekspor dikurangi impor.

Tabel 3. Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran Tahun 2018-2022 (Persen)

Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	59,39	59,20	59,28	57,82	57,67
2. Konsumsi LNPRT	0,96	1,01	1,00	0,99	1,00
3. Konsumsi Pemerintah	5,25	5,11	4,87	4,73	4,38
4. PMTB	29,29	29,72	27,62	27,87	26,89
5. Perubahan Inventori	1,37	0,96	1,05	0,90	1,03
6. Net Ekspor	3,74	4,00	6,18	7,68	9,03
PDRB PENGELUARAN	100	100	100	100	100

Catatan:

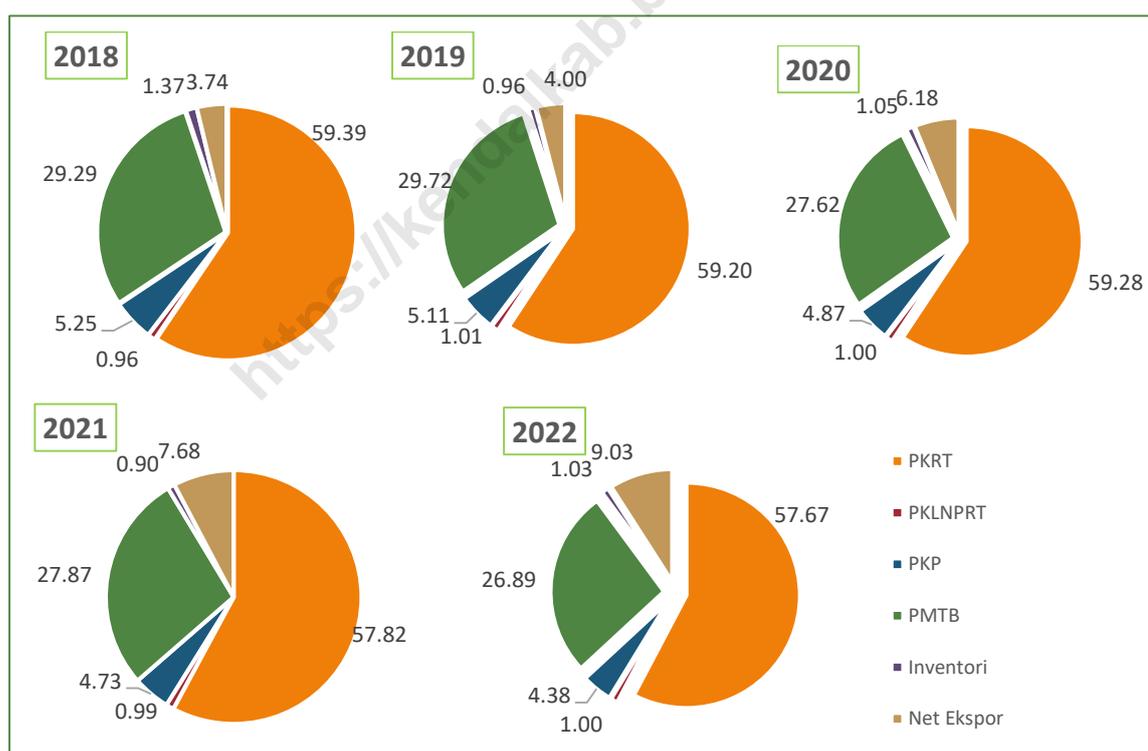
* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Berdasarkan Tabel 3 terlihat bahwa selama periode 2018 – 2022, produk yang dikonsumsi di wilayah domestik Kabupaten Kendal, sebagian besar masih untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga (mencapai 57 persen lebih), artinya bahwa lebih dari separuh PDRB menurut pengeluaran tercatat sebagai

pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga. Pengeluaran untuk pembentukan modal bruto (PMTB) memberi kontribusi yang cukup baik mencapai 26 hingga lebih dari 29 persen, sedangkan kontribusi konsumsi akhir pemerintah berada pada rentang 4-5 persen. Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam menyerap produk domestik tidak terlalu besar. Pada tahun 2018 – 2022, perdagangan Kabupaten Kendal yang direpresentasikan oleh transaksi ekspor dan impor, menunjukkan bahwa nilai net ekspor pada kurun waktu ini masih menunjukkan posisi “surplus”, diindikasikan oleh nilai selisih ekspor dan impor yang positif dan memberikan kontribusi sebesar 3-9 persen selama 2018 – 2022. Komponen konsumsi LNPRT dan inventori, walaupun memberikan kontribusi yang kecil, namun di tahun 2022 ini kontribusi kedua komponen mengalami peningkatan.

**Grafik 2. Perbandingan Distribusi PDRB menurut Pengeluaran
Dari Tahun 2018 dan Tahun 2022 (Persen)**



Dari Gambar 2 terlihat bahwa struktur PDRB menurut komponen pengeluaran menunjukkan pola yang hampir sama selama kurun waktu 5 tahun terakhir. PDRB masih didominasi oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga yang mencapai hampir 60 persen dan pengeluaran PMTB yang lebih dari 25 persen dari tahun ke tahun, secara total keduanya mencapai hampir 85 persen.



Perubahan terjadi pada distribusi persentase pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran PMTB, dan pengeluaran konsumsi pemerintah yang mengalami penurunan, digantikan komponen net ekspor yang meningkat, sedangkan komponen pengeluaran LNPRT dan Perubahan Inventori relatif stabil.

Agregat makro lain yang dapat diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau lebih dikenal dengan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), yang menggambarkan kinerja pembangunan di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kendal dari tahun 2018 – 2022 secara rata-rata mencapai 3,91 persen, dengan masing-masing pertumbuhan sebesar 5,77 persen (2018); 5,71 persen (2019); -1,51 persen (2020); 3,89 persen (2021); dan 5,69 persen (2022). Secara umum pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kendal cukup baik sebelum pandemi melanda, yang berdampak signifikan dimana pertumbuhan ekonomi tahun 2020 harus mengalami konstaksi ekonomi sebesar 1,51 persen. Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kendal mulai membaik dan mengalami peningkatan dan tumbuh positif sebesar 3,89 persen dan 5,69 persen di tahun 2021 dan tahun 2022.

**Tabel 4. Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Pengeluaran Tahun 2018-2022 (Persen)**

Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	4,55	4,68	-0,46	1,62	4,95
2. Konsumsi LNPRT	7,28	10,91	2,19	1,25	4,87
3. Konsumsi Pemerintah	2,09	4,04	4,13	0,82	0,17
4. PMTB	7,39	5,07	7,01	5,96	2,83
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Net Ekspor	-	-	-	-	-
PDRB PENGELUARAN	5,77	5,71	-1,51	3,89	5,69

Catatan:

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara



Tabel 5. Indeks Implisit PDRB menurut Pengeluaran
Tahun 2018-2022 (Persen)

Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	141,47	144,94	145,92	148,54	155,34
2. Konsumsi LNPRT	152,73	156,49	159,06	164,16	175,10
3. Konsumsi Pemerintah	162,48	163,31	162,65	166,31	169,13
4. PMTB	145,88	151,57	151,58	153,12	158,09
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Ekspor Netto	-	-	-	-	-
PDRB PENGELUARAN	135,23	137,63	139,86	142,78	148,68

Catatan:

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Sementara itu, indeks implisit¹ PDRB yang menggambarkan tingkat perubahan harga yang terjadi pada sisi konsumen, baik konsumen akhir (rumah tangga, LNPRT, dan pemerintahan) maupun konsumen lainnya (perusahaan dan luar negeri) juga menunjukkan peningkatan. Indeks implisit pada tahun 2018 sebesar 135,23 persen meningkat menjadi 148,68 persen pada tahun 2022.

B. PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA

Konsumsi akhir rumah tangga menempati porsi terbesar dalam PDRB menurut pengeluaran. Data pada Tabel 6 menunjukkan hal tersebut, dimana sebagian besar produk domestik dan produk impor digunakan untuk memenuhi konsumsi akhir rumah tangga. Dalam kurun waktu 2018 – 2022 konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan signifikan baik dalam nominal (atas dasar harga berlaku) maupun riil (atas dasar harga konstan), sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk maupun jumlah rumah tangga. Kenaikan jumlah penduduk mendorong terjadinya kenaikan nilai konsumsi rumah tangga, yang pada gilirannya akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Pada tahun 2020, ketika hampir seluruh komponen

¹ Indeks perkembangan harga



mengalami kontraksi ekonomi akibat adanya pandemic COVID 29, pengeluaran konsumsi rumah tangga mengalami konstaksi terendah hanya 0,46 persen.

Proporsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap PDRB pada periode tahun 2018 – 2022 relatif stabil di angka 57 – 60 persen. Pada kurun waktu 2018 – 2022, kontribusi ini merupakan tertinggi diantara komponen lainnya pada PDRB Pengeluaran. Titik kontribusi tertinggi nilai konsumsi rumah tangga terjadi pada tahun 2018 sebesar 59,39 dan titik terendah terjadi pada tahun 2022 yaitu hanya 57,67 persen.

**Tabel 6. Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga
Tahun 2018-2022**

Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga					
a. ADHB (Miliar Rp)	23.488,89	25.191,56	25.246,21	26.115,63	28.664,31
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	16.603,99	17.381,02	17.300,93	17.581,17	18.452,18
Distribusi Persentase PDRB ADHB (Persen)	59,39	59,20	59,28	57,82	57,67
Pertumbuhan¹⁾ (% ADHK)					
Total konsumsi RT	4,55	4,68	-0,46	1,62	4,95

Catatan:

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Angka proporsi pengeluaran konsumsi rumah tangga juga memberikan gambaran bahwa daya beli masyarakat Kabupaten Kendal mengalami fluktuasi selama periode lima tahun terakhir. Masa pemulihan ekonomi telah mendorong rumah tangga untuk memperbaiki serta mengembalikan perilaku dan kebiasaan konsumsinya setelah sekian lama mengalami masa-masa krisis. Walaupun sedikit melemah di tahun 2019, namun kembali membaik pada tahun 2020. Pandemic COVID-19 menyebabkan kebutuhan rumah tangga akan barang dan jasa kesehatan meningkat. Pada tahun 2021, angka proporsi pengeluaran konsumsi rumah tangga mengalami penurunan kembali menjadi 57,82 persen dibanding 2020 yang sebesar 59,28 persen. Pada tahun 2022, proporsi pengeluaran konsumsi rumah tangga mengalami penurunan kembali menjadi 57,67 persen dibanding 2021 yang sebesar 57,82 persen.

Secara total, pertumbuhan konsumsi rumah tangga atas dasar harga konstan sebesar 4,55 persen pada tahun 2018. Setelah sempat mengalami perlambatan di tahun 2020, sebelumnya pertumbuhan konsumsi rumah tangga mengalami percepatan di tahun 2019 hingga mencapai 4,68 persen. Adanya COVID-19 menyebabkan konsumsi rumah tangga mengalami kontraksi hingga 0,46 persen pada 2020. Namun, pada tahun 2021, konsumsi rumah tangga mengalami peningkatan kembali dengan pertumbuhan menjadi sebesar 1,62 persen. Pertumbuhan konsumsi akhir rumah tangga mengalami kenaikan lagi di tahun 2022, yaitu sebesar 4,95 persen. Nampak bahwa peningkatan keseluruhan konsumsi rumah tangga secara “riil” lebih tinggi dari peningkatan jumlah penduduk yang umumnya berada di bawah 1 persen. Hal ini mengindikasikan terjadi perubahan tingkat kemakmuran masyarakat, meskipun tidak dapat dijelaskan lebih jauh melalui perangkat data PDRB ini, melainkan melalui kajian khusus lainnya.

Tabel 7 di bawah, memperlihatkan struktur penggunaan konsumsi akhir rumah tangga. Dari tabel tersebut nampak 3 (tiga) konsumsi yang peranannya paling besar, yaitu konsumsi makanan, minuman dan rokok; konsumsi transportasi, komunikasi, rekreasi dan budaya; serta konsumsi perumahan, perkakas, perlengkapan dan penyelenggaraan rumah tangga.

**Tabel 7. Struktur Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga
Tahun 2018-2022 (Persen)**

Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	59,39	59,20	59,28	57,82	57,67
a. Makanan dan Minuman	22,33	22,03	22,75	22,71	22,80
b. Pakaian dan Alas Kaki	2,58	2,58	2,69	2,58	2,47
c. Perumahan dan Perlengkapan Rumah Tangga	8,33	8,12	8,23	7,89	7,44
d. Kesehatan dan Pendidikan	3,90	3,90	3,96	3,86	3,65
e. Transportasi dan Komunikasi	15,91	16,15	15,47	14,72	15,22
f. Restoran dan Hotel	5,20	5,31	4,99	4,91	4,95
g. lainnya	1,14	1,12	1,19	1,16	1,14

Catatan:

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara



Dalam struktur penggunaan konsumsi akhir rumah tangga, konsumsi makanan dan minuman konstribusinya relatif besar namun mempunyai kecenderungan menurun dari tahun 2018 hingga 2019, dan mengalami peningkatan di tahun 2020 menjadi 22,75 persen namun, kembali menurun menjadi 22,71 persen di tahun 2021. Komponen pengeluaran untuk pakaian dan alas kaki cenderung stabil di kisaran angka lebih dari 2 persen. Komponen pengeluaran untuk perumahan dan perlengkapan rumah tangga juga terlihat stabil di kisaran 7-8 persen. Demikian pula dengan komponen kesehatan dan pendidikan juga terlihat stabil di angka hampir 4 persen. Berbeda dengan komponen lainnya yang relatif stabil, untuk komponen pengeluaran konsumsi transportasi dan komunikasi mengalami penurunan menjadi 14,72 persen di tahun 2021 dari 15,47 persen di tahun 2020 dan 16,15 di tahun 2019.

Tiga besar kelompok pengeluaran, didominasi pengeluaran konsumsi makanan dan minuman 22,80 persen, pengeluaran transportasi dan komunikasi sebesar 15,22 persen dan pengeluaran untuk perumahan dan perlengkapan rumah tangga sebesar 7,44 persen. Dari ketiga kelompok konsumsi terbesar tersebut, konsumsi makanan, minuman pertumbuhannya cenderung stabil setiap tahun, sangat berbeda dengan pertumbuhan kelompok lain yang cenderung meningkat cukup tinggi di setiap tahunnya.

**Tabel 8. Pertumbuhan Riil Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga
Tahun 2018-2022 (Persen)**

Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4,55	4,68	-0,46	1,62	4,95
a. Makanan dan Minuman	3,30	3,72	3,33	1,81	4,59
b. Pakaian	5,03	5,50	1,04	0,34	2,93
c. Perumahan dan Perlengkapan Rumah Tangga	4,59	2,17	0,57	0,32	1,01
d. Kesehatan dan Pendidikan	5,05	4,75	3,82	0,21	2,11
e. Transportasi dan Komunikasi	4,93	6,15	-5,06	3,11	8,63
f. Restoran dan Hotel	7,79	7,46	-6,07	0,56	5,33
g. lainnya	4,19	4,01	0,21	0,18	1,91

Catatan:

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara



Pandemi Covid19 yang melanda sejak awal tahun 2020 berdampak cukup signifikan pada pertumbuhan komponen transportasi dan komunikasi juga pada pengeluaran komponen hotel dan restoran di tahun 2020. Meski demikian upaya penanganan pandemi Covid19 yang intens sehingga kasus Covid19 terkendali berdampak mulai membaiknya pengeluaran konsumsi pada komponen tersebut, dengan pertumbuhan yang positif di tahun 2021.

Pertumbuhan konsumsi selain makanan dan minuman yang lebih tinggi tersebut menunjukkan kebutuhan *non*-makanan menjadi semakin penting, hal ini sebagai akibat dari pengaruh tatanan ekonomi sosial dalam masyarakat yang telah mengalami perubahan/pergeseran.

Pertumbuhan konsumsi (riil) dapat menunjukkan adanya perubahan konsumsi rumah tangga dalam bentuk kuantum (*volume*) dari waktu ke waktu. Pada komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga, kelompok pengeluaran transportasi dan komunikasi serta restoran dan hotel mulai mengalami peningkatan setelah kontraksi di tahun sebelumnya, sedangkan kelompok lain juga tumbuh walaupun melambat dibanding tahun sebelumnya. Setelah mengalami kontraksi, pengeluaran transportasi dan komunikasi memiliki nilai pertumbuhan tertinggi pada komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga, yaitu sebesar 3,11 persen pada tahun 2021 dan sebesar 8,63 persen pada tahun 2022.

Tabel 9. Pertumbuhan Indeks Implisit Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Tahun 2018-2022 (Persen)

Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	2,64	2,45	0,68	1,79	4,58
a. Makanan dan Minuman	4,02	2,32	0,03	3,98	5,66
b. Pakaian	1,08	1,85	3,39	1,42	2,45
c. Perumahan dan Perlengkapan Rumah Tangga	2,10	2,60	0,93	1,25	2,76
d. Kesehatan dan Pendidikan	3,67	2,83	-1,98	3,14	1,90
e. Transportasi dan Komunikasi	1,23	2,88	0,96	-2,14	4,78
f. Restoran dan Hotel	2,41	2,24	0,06	3,92	5,26
g. lainnya	2,95	1,54	6,14	2,69	6,02



Catatan:

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tingkat perubahan indeks harga penggunaan konsumsi akhir rumah tangga secara implisit atau *current time* disajikan dalam Tabel 9. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa secara umum rincian peningkatan harga pada kelompok konsumsi akhir rumah tangga mengalami perlambatan dari tahun 2018 hingga 2021, namun kembali mengalami percepatan di tahun 2022, termasuk komponen transportasi dan komunikasi, yang sudah meningkat sebagai dampak berakhirnya berakhirnya pembatasan mobilitas akibat pemberlakuan PPKM.

C. PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR LNPRT

Peranan konsumsi akhir LNPRT dalam PDRB menurut pengeluaran masih sangat kecil dibandingkan dengan komponen pengeluaran lainnya, yaitu hanya sekitar 1 persen saja. Hal ini menunjukkan bahwa peranan institusi ini dalam perekonomian suatu wilayah masih perlu ditingkatkan lagi. Beberapa lembaga yang memberikan andil cukup besar untuk PKLNPRRT di Kabupaten Kendal adalah organisasi kemasyarakatan (ormas), partai politik, dan lembaga keagamaan.

**Tabel 10. Perkembangan Penggunaan Konsumsi LNPRT
Tahun 2018-2022**

Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi LNPRT					
a. ADHB (Miliar Rp)	378,15	429,72	427,22	446,44	378,15
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	230,79	274,59	268,59	271,95	247,59
Distribusi Persentase PDRB ADHB (Persen)	0,96	1,01	1,00	0,99	1,00
Laju Pertumbuhan ADHK (Persen)	7,28	10,91	-2,19	1,25	4,87
Indeks Implisit	152,73	156,49	159,06	164,16	175,10
Laju Implisit	2,21	2,46	1,64	3,21	6,66

Catatan:

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Dari Tabel 10, dapat dilihat pertumbuhan konsumsi LNPRT sempat mengalami kenaikan cukup baik. Namun, adanya pandemi COVID-19 berdampak pada penurunan konsumsi LNPRT, hingga kontraksi 2,19 persen di tahun 2020. Meskipun begitu, pada tahun 2021, konsumsi LNPRT mulai mengalami perbaikan dengan pertumbuhan sebesar 1,25 persen dan sebesar 4,87 persen pada tahun 2022.

D. PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH

Konsumsi akhir pemerintah bersama dengan konsumsi akhir rumah tangga dan LNPRT merupakan jumlah dari konsumsi akhir dalam suatu perekonomian suatu wilayah. Peranan konsumsi pemerintah dalam perekonomian Kabupaten Kendal serta bagaimana perkembangannya akan dijelaskan dalam uraian di bawah ini.

Secara total, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah tahun 2021 mulai mengalami peningkatan, setelah mengalami penurunan di tahun 2020, baik untuk nilai atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Pada tahun 2018, total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah atas dasar harga berlaku sebesar 2,077 triliun rupiah, terus meningkat hingga tahun 2019 menjadi 2,173 triliun rupiah. Pada tahun 2020, mengalami penurunan menjadi 2,074 triliun rupiah, namun mengalami peningkatan kembali di tahun 2021 menjadi 2,138 triliun rupiah. Hal yang sama juga terjadi pada konsumsi pemerintah atas dasar harga konstan 2010, mengalami peningkatan hingga tahun 2019, kemudian mengalami penurunan di tahun 2020, namun mengalami peningkatan kembali di tahun 2021 dan tahun 2022.

**Tabel 11. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah
Tahun 2018-2022**

Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Pemerintah					
a. ADHB (Miliar Rp)	2.077,52	2.172,54	2.074,34	2.138,40	2.178,48
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	1.278,61	1.330,33	1.275,33	1.285,79	1.288,01
Distribusi Persentase terhadap PDRB ADHB	5,25	5,11	4,87	4,73	4,38
Laju Pertumbuhan					
Total konsumsi pemerintah	2,09	4,04	-4,13	0,82	0,17

Catatan: * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara



Menarik untuk dicermati lebih lanjut bahwa proporsi pengeluaran akhir pemerintah terhadap PDRB pada lima tahun terakhir mengalami penurunan. Hingga pada tahun 2022 ini mengalami persentase terendah sebesar 4,38 persen sedangkan proporsi tertinggi terjadi pada tahun 2018 mencapai 5,25 persen.

Dalam prakteknya, pengeluaran pemerintah seringkali dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat (publik). Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk, baik langsung maupun tidak langsung. Pengeluaran konsumsi pemerintah secara total menunjukkan peningkatan dari tahun 2018-2019, namun melambat di tahun 2020 hingga 2022.

Konsumsi akhir pemerintah secara “riil” menunjukkan peningkatan baik secara keseluruhan maupun rata-rata per kapita. Parameter ini adalah pendekatan untuk mengukur pemerataan kesempatan masyarakat atas penggunaan sumber daya finansial oleh pemerintah. Dalam kurun waktu 2018 – 2022, pertumbuhan konsumsi pemerintah mengalami percepatan hingga tahun 2019, kemudian mengalami perlambatan di tahun 2020 akibat pandemi COVID-19. Setelah itu kembali mengalami peningkatan di tahun 2021, sebesar 0,82 persen dan mengalami perlambatan kembali di tahun 2022, sebesar 0,17 persen.

E. PERKEMBANGAN PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)

Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran, lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Atau pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital)². Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (*indirect-input*) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

Selain peningkatan yang terjadi pada komponen konsumsi akhir (rumah tangga maupun pemerintah), PMTB juga menunjukkan peningkatan baik secara nominal maupun *riil* di tahun 2022. Data pada Tabel 12 menjelaskan bahwa pertumbuhan PMTB mengalami perlambatan hingga tahun 2019, kemudian pada tahun 2020, pertumbuhan

²Selain bagian lain yang menjadi konsumsi antara, konsumsi akhir, ataupun diekspor

mengalami penurunan sebesar 7,01 persen akibat adanya pandemi COVID-19, namun mengalami peningkatan kembali di tahun 2021 sebesar 5,96 persen seiring dengan telah selesainya pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, pembuatan tanggul dan normalisasi saluran sungai serta pembangunan pabrik dan fasilitas di Kawasan Ekonomi Khusus. Kemudian mengalami perlambatan kembali di tahun 2022, sebesar 2,83 persen.

**Tabel 12. Perkembangan dan Struktur PMTB
Tahun 2018-2022**

Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total PMTB					
a. ADHB (Miliar Rp)	11.584,72	12.646,18	11.760,18	12.587,74	13.363,36
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	7.941,11	8.343,58	7.758,58	8.220,63	8.453,12
Distribusi Persentase PDRB ADHB (Persen)	29,29	29,72	27,62	27,87	26,89
Laju Pertumbuhan ADHK (Persen)	7,39	5,07	-7,01	5,96	2,83
Indeks Implisit	145,88	151,57	151,58	153,12	158,09
Laju Implisit	4,66	3,90	0,01	1,02	3,24

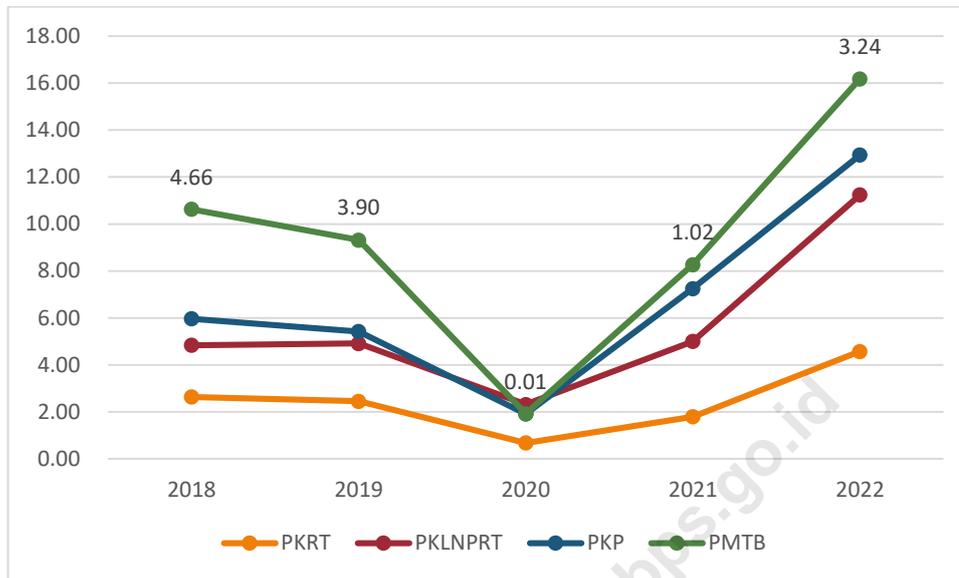
* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Distribusi persentase atau kontribusi pengeluaran komponen PMTB terhadap nilai total PDRB dalam kurun waktu 2018 – 2019 mengalami peningkatan dan sedikit mengalami penurunan di tahun 2020 menjadi 27,62 persen, kemudian mengalami peningkatan sedikit di tahun 2021 menjadi 27,87 persen.



**Grafik 3. Pertumbuhan Beberapa Komponen Pengeluaran
2018-2022 (Persen)**



F. PERKEMBANGAN PERUBAHAN INVENTORI

Secara konsep, yang dimaksud dengan perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk **"persediaan"** berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi ataupun investasi (kapital). Perubahan yang dimaksud di sini bisa berarti penambahan (bertanda positif) dan atau pengurangan (bertanda negatif).

Dari sisi penghitungan, komponen Perubahan Inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya bisa memiliki 2 (dua) tanda angka, positif atau negatif (disamping komponen net ekspor antar daerah). Apabila perubahan inventori bertanda positif artinya terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif artinya terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).



**Tabel 13. Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori
Tahun 2018-2022**

Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Inventori					
a. ADHB (Miliar Rp)	542,24	406,58	447,83	408,28	511,24
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	241,33	219,77	300,08	221,45	270,63
Distribusi Persentase PDRB ADHB (Persen)	1,37	0,96	1,05	0,90	1,03
Laju Pertumbuhan ADHK (Persen)	5,05	-8,93	36,54	-26,20	22,21

Catatan:

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis lebih rinci, perubahan inventori baru dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen inventori tidak banyak dikaji lebih dalam. Hal utama yang dapat dilihat dari komponen ini adalah proporsi, dalam PDRB pada umumnya mempunyai besaran atau nilai yang berfluktuasi baik dalam level maupun tandanya (positif atau negatif).

Proporsi perubahan inventori terhadap PDRB mengalami fluktuasi namun kontribusinya dalam kurun waktu lima tahun terakhir tidak pernah lebih dari 2 persen. Pada tahun 2021 proporsinya sebesar 0,90 merupakan proporsi terendah selama lima tahun terakhir, sedangkan proporsi tertinggi pada tahun 2018 yaitu sebesar 1,37 persen.

G. PERKEMBANGAN EKSPOR NETTO BARANG DAN JASA

Ekspor netto antar daerah didefinisikan sebagai ekspor antar daerah dikurangi impor antar daerah. Berbeda dengan penghitungan ekspor-impor barang dan jasa luar negeri, pada penghitungan ekspor-impor antar daerah tidak tersedia sumber data yang sesuai dengan konsep dan definisi yang ditentukan. Sumber data yang tersedia selama ini hanya menunjukkan adanya transaksi namun tidak diketahui berapa nilai uang terjadi dalam transaksi tersebut. Keberadaan data dengan kondisi seperti ini



menyebabkan penghitungan ekspor-impor antar provinsi dan kabupaten/kota menjadikan komponen ini (dalam series PDRB tahun dasar 2010) diperlakukan sebagai item penyeimbang (residual), yakni perbedaan antara total PDRB menurut pengeluaran dengan PDRB menurut lapangan usaha. Ketersediaan data yang ada lebih sesuai untuk dimanfaatkan sebagai informasi pendukung.

Komponen ini secara implisit mencakup dua unsur pokok yaitu, ekspor antar daerah dan impor antar daerah. Sama halnya dengan perubahan inventori, net ekspor antar daerah juga hasilnya dapat memiliki 2 (dua) angka, positif atau *negative*. Jika komponen ini bertanda “positif” berarti nilai ekspor antar daerah lebih besar daripada impor antar daerah, demikian pula sebaliknya, apabila bertanda “negative” berarti nilai ekspor antar daerah lebih kecil daripada impor antar daerah.

Pada saat ini untuk memisahkan net ekspor antar daerah menjadi nilai ekspor antar daerah dan nilai ekspor antar daerah dilakukan dengan metode tidak langsung, yaitu dengan metode cross-hauling. Metode ini bekerja dengan memandaatkan sifar keseimbangan permintaan (demand) dan penyediaan (supply) setiap komoditas di suatu perekonomian. Penghitungan ekspor impor dengan metode cross-hauling diawali dengan metode commodity balance. Metode commodity balance adalah metode penghitungan ekspor-impor dipandang sebagai item penyeimbang (balancing item) dalam keseimbangan demand dan supply suatu perekonomian.

Dari Tabel 14 berikut dapat dilihat gambaran ekspor dan impor antar daerah, yaitu ekspor Kabupaten Kendal ke kabupaten/kota lain serta impor dari kabupaten/kota lain ke Kabupaten Kendal. Nilai net ekspor atas dasar harga konstan terlihat bahwa nilai ekspor antar daerah selalu lebih besar dibanding impornya, sehingga net ekspor antar daerah selalu positif dari tahun ke tahun. Begitu pula dengan nilai net ekspor atas dasar harga berlaku juga menunjukkan hal yang sama. Selama kurun waktu 2018 – 2022 nilai ekspor daerah cenderung lebih besar dari nilai impornya, sehingga net ekspor antar daerah bertanda positif. Hal ini menggambarkan bahwa nilai barang/jasa yang dikirm keluar Kabupaten Kendal lebih tinggi dari barang/jasa yang didatangkan ke Kabupaten Kendal.



**Tabel 14. Perkembangan Ekspor Netto
Tahun 2018 - 2022**

Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Ekspor Netto					
a. ADHB (Miliar Rp)	1.477,47	1.704,12	2.630,41	3.468,31	4.488,36
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	2.933,03	3.367,10	3.545,52	4.051,30	4.682,21

Catatan:

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

<https://kendalkab.bps.go.id>



BAB IV

PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB MENURUT PENGELUARAN KABUPATEN KENDAL TAHUN 2018-2022



<https://kendalkab.bps.go.id>



IV

PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB Kabupaten Kendal

Data statistik sangat diperlukan untuk melihat sejauh mana pencapaian pembangunan di suatu wilayah. Data statistik juga diperlukan untuk memonitor dan mengevaluasi strategi dan kebijakan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya. Demikian halnya dengan data PDRB, berbagai indikator ekonomi makro yang lazim digunakan dalam analisis sosial ekonomi dapat diturunkan dari seperangkat data PDRB. Berikut ini disajikan beberapa rasio (perbandingan *relative*) guna melengkapi analisis PDRB menurut pengeluaran, berdasarkan informasi dan data yang tersedia.

A. PDRB (NOMINAL)

Nilai PDRB nominal atau atas dasar harga berlaku 2022 menunjukkan nilai sebesar 49,71 triliun rupiah, meningkat dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 45,16 triliun rupiah. Angka agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam suatu wilayah ekonomi domestik, dimana di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran “produktivitas”, karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan nilai tambah, konsumsi atau pengeluaran, dan pendapatan.

Dari series data PDRB pengeluaran dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain (seperti rumah tangga, dan tenaga kerja).

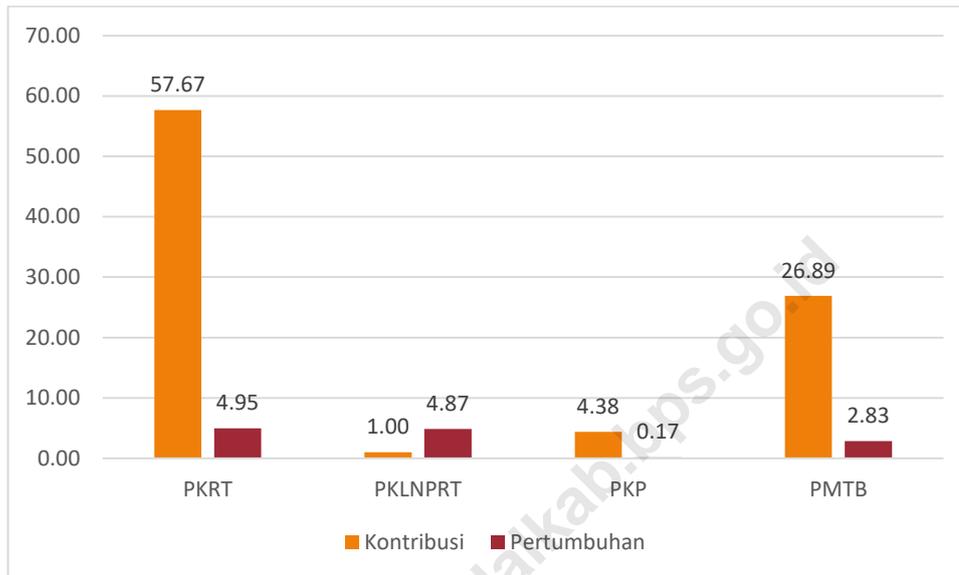
B. STRUKTUR PEREKONOMIAN

Secara struktur ekonomi, nilai PDRB menurut pengeluaran apabila dicermati menurut komponen penyusunan, maka terlihat bahwa peranan konsumsi rumah tangga dalam nilai total PDRB masih paling tinggi. Meskipun, dalam kurun waktu lima tahun terakhir dominasi peranannya semakin menurun, namun tetap pada angka tertinggi. Sementara peranan komponen net ekspor semakin menguat di tahun 2022 ini.



Peningkatan peran net ekspor memberi gambaran bahwa pasar lokal di Kabupaten Kendal mampu menjangkau pangsa pasar di luar wilayah Kendal dengan cukup baik.

Grafik 4. Kontribusi dan Pertumbuhan Komponen PDRB Tahun 2022 (persen)

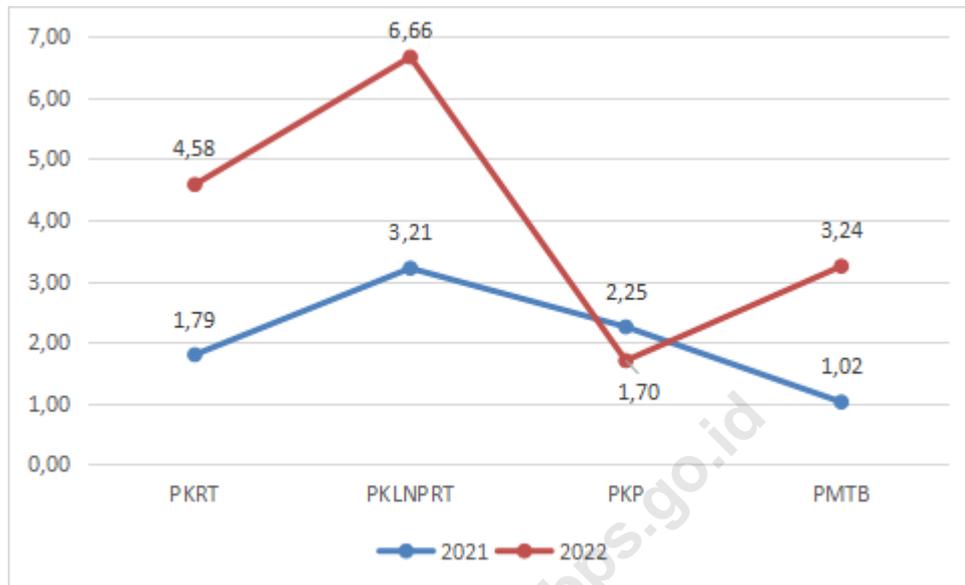


Komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga (PKRT), pengeluaran konsumsi LNPRT (PKLNPRT), konsumsi pemerintah (PKP), dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) mengalami laju pertumbuhan di bawah pertumbuhan total PDRB pada tahun 2022.

Selama kurun waktu 2018-2022, pertumbuhan komponen PMTB menunjukkan angka yang menggembirakan. Pertumbuhan yang cukup tinggi dicapai pada kurun waktu tersebut. Hal ini sejalan dengan adanya proyek-proyek nasional seperti pembangunan kawasan industri di KIK (Kawasan Industri Kendal) yang telah naik peringkat menjadi KEK (Kawasan Ekonomi Khusus), pembangunan jalan tol maupun infrastruktur lainnya. Pertumbuhan PMTB melambat di tahun 2019 ini, bertepatan dengan mulai berakhirnya proyek-proyek nasional tersebut. Sedangkan pada tahun 2020, laju pertumbuhan PMTB mengalami perlambatan yang cukup tinggi hingga 0,01 persen akibat pandemi COVID-19, yang berdampak pada perlambatan pertumbuhan PDRB secara keseluruhan.

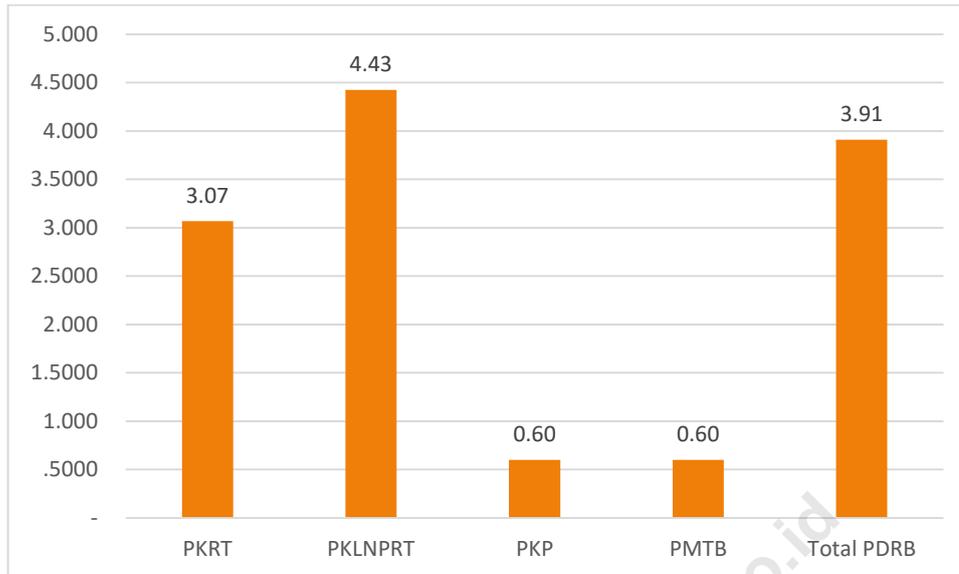


Grafik 5. Perbandingan Pertumbuhan Komponen PDRB Pengeluaran Kabupaten Kendal Tahun 2021-2022



Pertumbuhan rata-rata pada komponen PDRB Pengeluaran Kabupaten Kendal tahun 2022 secara umum lebih tinggi dibandingkan tahun 2021, kecuali pada komponen Pengeluaran Pemerintah. Pengeluaran Pemerintah pada tahun 2022 mengalami perlambatan sebesar 1,70 persen. Konsumsi LNPRT juga relatif tinggi. Pertumbuhan pada komponen LNPRT mulai meningkat sejak tahun 2016, kemudian mencapai puncak dalam kurun waktu lima tahun terakhir pada tahun 2019. Hal ini dipicu oleh pelaksanaan pemilu presiden maupun legislatif di tahun itu. Namun pada tahun 2020, laju pertumbuhan LNPRT juga mengalami perlambatan hingga 1,64 persen kemudian kembali meningkat di tahun 2021 dan 2022 sebesar 3,21 persen dan 6,66 persen.

Grafik 6. Rata-rata Pertumbuhan Komponen PDRB Pengeluaran Tahun 2018 - 2022 (persen)



C. PERBANDINGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP PMTB

Rasio ini merupakan perbandingan antara produk yang digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga dengan yang digunakan untuk investasi fisik (pembentukan modal tetap). Dari Tabel 15 dapat dilihat bahwa sebagian besar penggunaan produk yang tersedia di wilayah domestik Kabupaten Kendal digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga.

Rata-rata rasio konsumsi rumah tangga terhadap PMTB selama lima tahun terakhir berkisar 2. Hal ini dapat diartikan bahwa penggunaan produk untuk konsumsi rumah tangga lebih dari 2 kali dibanding untuk PMTB. Walaupun nilai ini cenderung stabil selama lima tahun terakhir, namun polanya terus menurun hingga pada tahun 2019 mencapai titik terendah, dari 2,03 pada tahun 2018 menjadi 1,99 pada tahun 2019. Apabila ditelusuri lebih jauh, penurunan tersebut lebih disebabkan peningkatan nilai PMTB yang cukup besar di tahun-tahun tersebut.

**Tabel 15. Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB
Tahun 2018—2022**

Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi RT (ADHB) (Miliar)	23.488,89	25.191,56	25.246,21	26.115,63	28.664,31
Total PMTB (ADHB) (Miliar)	11.584,72	12.646,18	11.760,18	12.587,74	13.363,36

Perbandingan Konsumsi RT thd PMTB	2,03	1,99	2,15	2,07	2,14
--	------	------	------	------	------

Catatan:

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

D. PROPORSI KONSUMSI AKHIR TERHADAP PDRB

Konsumsi akhir adalah penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir (baik berasal dari produk domestik maupun impor), untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah. Walaupun ketiga institusi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi, tetapi sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir.

Lebih dari 63 persen produk barang dan jasa yang berada di wilayah domestik Kabupaten Kendal digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir. Dalam kurun waktu lima tahun proporsi ini relatif stabil, dalam rentang 63-66 persen. Sedangkan produk yang tidak digunakan menjadi konsumsi akhir, yaitu PMTB dan ekspor memiliki peran yang relatif kecil, berkisar 37 persen.

Tabel 16. Proporsi Penggunaan Konsumsi Akhir terhadap PDRB Tahun 2018—2022

Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Akhir (ADHB) (Miliar)					
a. Rumah Tangga	23.488,89	25.191,56	25.246,21	26.115,63	28.664,31
b. LNPRT	378,15	429,72	427,22	446,44	499,40
c. Pemerintah	2.077,52	2.172,54	2.074,34	2.138,40	2.178,48
Jumlah	25.944,56	27.793,82	27.747,77	28.700,47	31.342,19
PDRB (ADHB) (Miliar Rp)	39.548,99	42.550,71	42.586,19	45.164,80	49.705,16
Proporsi	0,66	0,65	0,65	0,64	0,63

Catatan:

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara



E. INCREMENTAL CAPITAL OUTPUT RATIO (ICOR)

"ICOR" merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (*output*) dengan menggunakan investasi tersebut. ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah output (keluaran).

Kapital diartikan sebagai barang modal fisik yang dibuat oleh manusia dari sumber daya alam, untuk digunakan secara terus menerus dan berulang dalam proses produksi. Sedangkan output adalah besarnya nilai keluaran dari suatu proses ekonomi (produksi) yang dalam hal ini digambarkan melalui parameter "Nilai Tambah".

Formula:

$$ICOR = \frac{\Delta K}{\Delta Y} = \frac{I}{\Delta Y} = \frac{I_t}{Y_t - Y_{t-1}}$$

Dimana:

I_t = PMTB tahun ke t

Y_t = Output tahun ke t

Y_{t-1} = Output tahun ke t-1

Dengan menggunakan rasio ini, maka ICOR mampu menjelaskan perbandingan antara penambahan kapital terhadap output atau yang diartikan juga bahwa setiap pertambahan satu unit nilai output (keluaran) akan membutuhkan penambahan kapital sebanyak "K" unit.

**Tabel 17. Incremental Capital Output Ratio
Tahun 2018 - 2022**

Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB (ADHK 2010) (Miliar)	29.245,66	30.916,39	30.449,02	31.632,28	33.431,36
Perubahan (Miliar)	1.595,88	1.670,73	-467,37	1.183,26	1.799,08
PMTB (ADHK 2010) (Miliar)	7.941,11	8.343,58	7.758,58	8.220,63	8.453,12
ICOR	4,98	4,99	-16,60	6,95	4,70

Catatan:

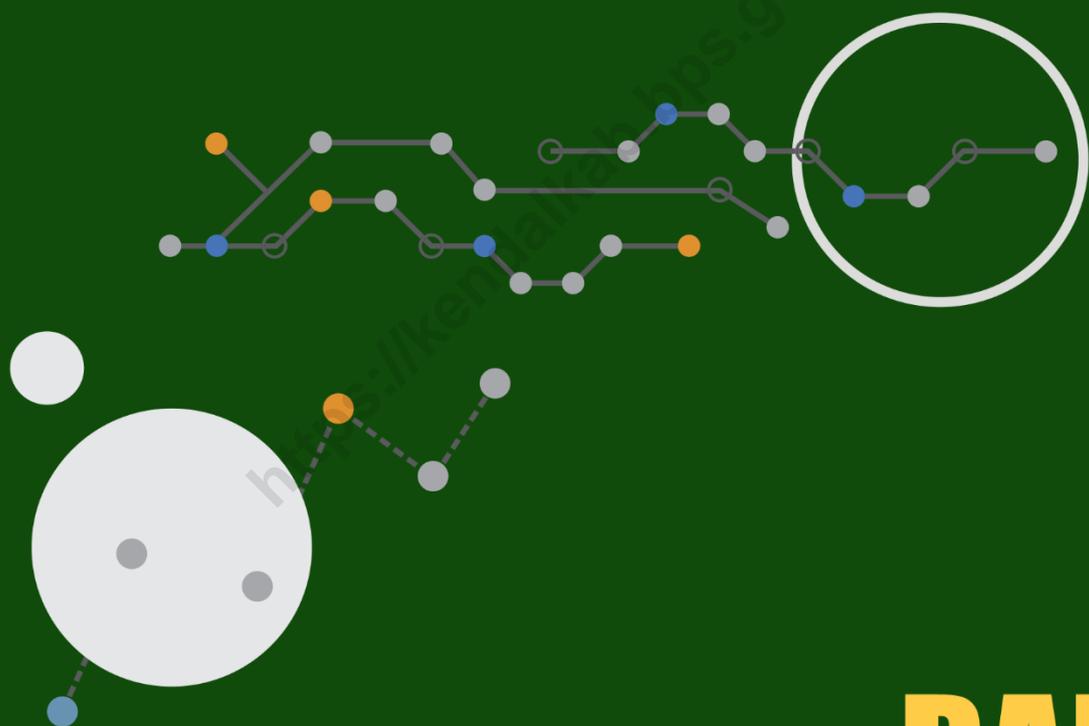
* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara



Data di atas menunjukkan besaran ICOR, selama kurun waktu lima tahun terakhir yaitu 2018-2022 cenderung mengalami tren peningkatan, kecuali tahun 2020 saat pandemi melanda berdampak signifikan pada nilai ICOR hingga berada pada nilai minus 16,60. Nilai ICOR tertinggi terjadi pada tahun 2021 mencapai 6,95 sedangkan terkecil pada tahun 2022 sebesar 4,70. Semakin tinggi nilai ICOR menunjukkan semakin besar kapital yang digunakan untuk dapat meningkatkan 1 unit nilai output.

Pada tahun 2020, ICOR bernilai minus, data menunjukkan bahwa sebagian barang modal kemungkinan dijual, rusak atau non aktif sedangkan barang modal yang tersedia tidak mampu menghasilkan output bahkan mengurangi output, akibat pembatasan yang diberlakukan pada masa pandemi. Penerapan kebijakan PSBB di awal pandemi menyebabkan sebagian besar perusahaan memutuskan untuk melepas beberapa aset untuk bertahan dan menggaji karyawan. Setelah masa PSBB berakhir aktivitas produksi kembali berjalan dengan menerapkan protokol kesehatan dan perbaikan ICOR menunjukkan hasil yang menggembirakan di tahun 2021 yaitu sebesar 6,95 tertinggi selama kurun waktu 5 tahun terakhir.



BAB V

PENUTUP



1. PDRB menurut pengeluaran tahun 2018 - 2022 dapat menggambarkan perubahan struktur dan perkembangan kondisi ekonomi Kabupaten Kendal pada periode bersangkutan. Analisis ekonomi dari sisi PDRB pengeluaran akan berbeda dengan analisis dari sisi lapangan usaha (industri) yang lebih fokus pada perilaku produksi. Analisis PDRB pengeluaran terfokus pada perilaku penggunaan barang dan jasa akhir, baik untuk tujuan konsumsi akhir, investasi (fisik), maupun perdagangan internasional dan antar daerah. Empat kelompok sektor atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga/LNPRT, pemerintah, dan perusahaan.
2. Nominal PDRB Kabupaten Kendal tahun 2022 atas dasar harga berlaku mencapai 49,71 triliun rupiah. Dari nilai sebesar itu sebagian besar digunakan untuk konsumsi akhir, yaitu konsumsi rumah tangga, LNPRT dan pemerintah yang mencapai 63 persen dimana 57,67 persennya adalah konsumsi rumah tangga. Dengan peranan konsumsi rumah tangga yang sangat dominan, tidak dapat dipungkiri bahwa komponen ini adalah penopang dan penggerak utama pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kendal. Tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kendal mencapai 5,69 persen, sedangkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga mencapai 4,95 persen.
3. Peranan investasi dalam perekonomian selalu merupakan *issue* yang menarik untuk diulas, karena investasi dalam bentuk kapital/modal fisik akan digunakan secara terus menerus dan berulang dalam proses produksi yang keluarannya adalah output. Peranan investasi dalam PDRB Pengeluaran Kabupaten Kendal dapat didekati dari proporsi PMTB dalam PDRB. Proporsi PMTB ini berada pada kisaran 27-30 persen, atau dapat dikatakan peranan investasi dalam perekonomian Kabupaten Kendal hanya sekitar 28 persen saja. Dari nilai ICOR Kabupaten Kendal yang kembali meningkat dapat disimpulkan bahwa untuk menambah 1 unit output setiap tahun, investasi yang ditanamkan semakin besar.
4. PDRB Kabupaten Kendal 2022 baru sanggup memenuhi 63 persen dari total permintaan akhir, sehingga kekurangan *supply* diperoleh dari impor. Impor yang



dimaksud disini adalah impor dari luar negeri, provinsi, maupun dari kabupaten/kota lain. Peranan impor dalam perekonomian Kabupaten Kendal cukup besar dan nilainya relatif meningkat dari tahun ke tahun.

5. Selama periode 2018 – 2022, nilai impor Kabupaten Kendal lebih kecil dari nilai eksportnya, sehingga setiap tahun terjadi surplus neraca perdagangan. Surplus perdagangan Kabupaten Kendal menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.
6. Dari seluruh data, indikator dan ulasan yang ditampilkan dalam publikasi ini dapat dimanfaatkan oleh para pengguna data untuk berbagai keperluan, seperti perencanaan, evaluasi dan berbagai analisis ekonomi lainnya. Data dan indikator yang diturunkan dari sajian data PDRB menurut pengeluaran, juga dapat dijadikan acuan bagi pengembangan dan perluasan indikator ekonomi makro lain seperti pendapatan disposabel, tabungan, serta model ekonomi sederhana yang saling berkaitan antara seluruh variabel ekonomi dan variabel yang tersedia. Bahkan secara langsung maupun tidak langsung dapat dikaitkan dengan tampilan data ekonomi makro lain seperti PDRB menurut lapangan usaha (industri), Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) dan bahkan Neraca Arus Dana.



DAFTAR PUSTAKA

1. Badan Pusat Statistik, *Sistem Neraca Nasional 2008*, Jakarta, 2013.
2. _____, *Pedoman Penyusunan PDRB Kabupaten/Kota Tahun Dasar 2010 Menurut Pengeluaran*, Jakarta, 2014.
3. _____, *Booklet Perubahan Tahun Dasar PDB Berbasis SNA 2008*, Jakarta, 2014.
4. _____, *Produk Domestik Bruto menurut Penggunaan 2008-2013*, Jakarta, 2014.
5. BPS Provinsi Jawa Tengah, *Tabel Input Output Jawa Tengah*, berbagai seri, Semarang.
6. _____, *Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah*, berbagai seri, Semarang.
7. _____, *Beberapa Indikator Makro Sosial Ekonomi Jawa Tengah*, berbagai seri, Semarang.
8. _____, *Kabupaten Kendal dalam Angka*, berbagai seri, Kendal.
9. _____, *Statistik Air Bersih Jawa Tengah*, berbagai seri, Semarang.
10. _____, *Statistik Impor Jawa Tengah*, berbagai seri, Semarang.
11. _____, *Statistik Industri Manufaktur Besar Sedang Jawa Tengah*, berbagai seri, Semarang.
12. _____, *Statistik Ekspor Jawa Tengah*, berbagai seri, Semarang.



<https://kendalkab.bps.go.id>



LAMPIRAN



<https://kendalkab.bps.go.id>

**Lampiran 1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Pengeluaran 2018-2022 (Juta Rupiah)**

Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021*)	2022**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	23.488.888,12	25.191.559,75	25.246.209,75	26.115.627,34	28.664.311,03
1.a. Makanan dan Minuman	8.831.172,62	9.372.435,19	9.687.435,19	10.255.087,84	11.332.811,84
1.b. Pakaian	1.019.991,55	1.096.032,94	1.145.032,94	1.165.208,42	1.228.695,87
1.c. Perumahan dan Perlengkapan Rumah Tangga	3.295.281,03	3.454.146,53	3.506.146,53	3.561.261,87	3.696.425,78
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	1.540.472,39	1.659.242,81	1.688.492,81	1.745.091,09	1.815.706,92
1.e. Transportasi dan Komunikasi	6.291.961,71	6.871.451,38	6.586.451,38	6.646.128,95	7.564.289,53
1.f. Restoran dan Hotel	2.057.286,62	2.260.126,60	2.124.126,60	2.219.730,22	2.461.201,84
1.g. lainnya	452.722,20	478.124,30	508.524,30	523.118,95	565.179,25
2. Konsumsi LNPRT	378.150,97	429.721,28	427.221,28	446.442,91	499.399,92
3. Konsumsi Pemerintah	2.077.516,87	2.172.541,45	2.074.341,45	2.138.401,43	2.178.482,31
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	11.584.723,46	12.646.182,31	11.760.182,31	12.587.736,45	13.363.359,45
5. Perubahan Inventori	542.243,04	406.583,05	447.826,34	408.282,90	511.240,83
6. Net Ekspor	1.477.470,80	1.704.119,13	2.630.405,56	3.468.309,77	4.488.362,76
PDRB PENGELUARAN	39.548.993,26	42.550.706,97	42.586.186,69	45.164.800,80	49.705.156,30

Catatan:

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara



**Lampiran 2. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan
menurut Pengeluaran 2018-2022 (Juta Rupiah)**

Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021*)	2022**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	16.603.989,29	17.381.017,19	17.300.933,00	17.581.166,86	18.452.181,58
1.a. Makanan dan Minuman	5.710.791,71	5.923.290,27	6.120.806,08	6.231.305,69	6.517.373,90
1.b. Pakaian	861.737,16	909.132,70	918.632,70	921.775,73	948.764,44
1.c. Perumahan dan Perlengkapan Rumah Tangga	2.399.546,92	2.451.537,18	2.465.537,18	2.473.405,55	2.498.415,92
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	1.133.539,83	1.187.382,97	1.232.732,97	1.235.306,92	1.261.382,63
1.e. Transportasi dan Komunikasi	4.698.097,19	4.987.030,17	4.734.830,17	4.882.112,30	5.303.285,53
1.f. Restoran dan Hotel	1.456.074,67	1.564.639,60	1.469.639,60	1.477.869,58	1.556.703,49
1.g. lainnya	344.201,81	358.004,30	358.754,30	359.391,09	366.255,68
2. Konsumsi LNPRT	247.587,21	274.592,26	268.592,26	271.949,66	285.206,52
3. Konsumsi Pemerintah	1.278.612,43	1.330.327,56	1.275.327,56	1.285.785,25	1.288.014,74
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	7.941.110,03	8.343.578,12	7.758.578,12	8.220.627,74	8.453.120,99
5. Perubahan Inventori	241.332,99	219.771,50	300.078,28	221.446,65	270.629,16
6. Net Ekspor	2.933.032,57	3.367.099,84	3.545.515,18	4.051.299,87	4.682.206,98
PDRB PENGELUARAN	29.245.664,52	30.916.386,47	30.449.024,40	31.632.276,02	33.431.359,98

Catatan:

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

**Lampiran 3. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar
Harga Berlaku menurut Pengeluaran 2018-2022 (Persen)**

Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021*)	2022**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	59,39	59,20	59,28	57,82	57,67
1.a. Makanan dan Minuman	22,33	22,03	22,75	22,71	22,80
1.b. Pakaian	2,58	2,58	2,69	2,58	2,47
1.c. Perumahan dan Perlengkapan Rumah Tangga	8,33	8,12	8,23	7,89	7,44
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	3,90	3,90	3,96	3,86	3,65
1.e. Transportasi dan Komunikasi	15,91	16,15	15,47	14,72	15,22
1.f. Restoran dan Hotel	5,20	5,31	4,99	4,91	4,95
1.g. lainnya	1,14	1,12	1,19	1,16	1,14
2. Konsumsi LNPRT	0,96	1,01	1,00	0,99	1,00
3. Konsumsi Pemerintah	5,25	5,11	4,87	4,73	4,38
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	29,29	29,72	27,62	27,87	26,89
5. Perubahan Inventori	1,37	0,96	1,05	0,90	1,03
6. Net Ekspor	3,74	4,00	6,18	7,68	9,03
PDRB PENGELUARAN	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Catatan:

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara



**Lampiran 4. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar
Harga Konstan 2010 menurut Pengeluaran 2018-2022 (Persen)**

Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021*)	2022**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	4,55	4,68	-0,46	1,62	4,95
1.a. Makanan dan Minuman	3,30	3,72	3,33	1,81	4,59
1.b. Pakaian	5,03	5,50	1,04	0,34	2,93
1.c. Perumahan dan Perlengkapan Rumah Tangga	4,59	2,17	0,57	0,32	1,01
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	5,05	4,75	3,82	0,21	2,11
1.e. Transportasi dan Komunikasi	4,93	6,15	-5,06	3,11	8,63
1.f. Restoran dan Hotel	7,79	7,46	-6,07	0,56	5,33
1.g. lainnya	4,19	4,01	0,21	0,18	1,91
2. Konsumsi LNPRT	7,28	10,91	-2,19	1,25	4,87
3. Konsumsi Pemerintah	2,09	4,04	-4,13	0,82	0,17
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	7,39	5,07	-7,01	5,96	2,83
PDRB PENGELUARAN	5,77	5,71	-1,51	3,89	5,69

Catatan:

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara



**Lampiran 5. Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100)
Menurut Pengeluaran 2018-2022 (Persen)**

Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021*)	2022**)
(1)	(2)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Konsumsi Rumah Tangga	141,47	144,94	145,92	148,54	141,47
1.a. Makanan dan Minuman	154,64	158,23	158,27	164,57	154,64
1.b. Pakaian	118,36	120,56	124,65	126,41	118,36
1.c. Perumahan dan Perlengkapan Rumah Tangga	137,33	140,90	142,21	143,98	137,33
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	135,90	139,74	136,97	141,27	135,90
1.e. Transportasi dan Komunikasi	133,93	137,79	139,11	136,13	133,93
1.f. Restoran dan Hotel	141,29	144,45	144,53	150,20	141,29
1.g. lainnya	131,53	133,55	141,75	145,56	131,53
2. Konsumsi LNPRT	152,73	156,49	159,06	164,16	152,73
3. Konsumsi Pemerintah	162,48	163,31	162,65	166,31	162,48
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	145,88	151,57	151,58	153,12	145,88
5. Perubahan Inventori	224,69	185,00	149,24	184,37	224,69
6. Net Ekspor	50,37	50,61	74,19	85,61	50,37
PDRB PENGELUARAN	135,23	137,63	139,86	142,78	135,23

Catatan:

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara



**Lampiran 6. Laju Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100) menurut
Pengeluaran 2018-2022 (Persen)**

Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021*)	2022**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	2,64	2,45	0,68	1,79	4,58
1.a. Makanan dan Minuman	4,02	2,32	0,03	3,98	5,66
1.b. Pakaian	1,08	1,85	3,39	1,42	2,45
1.c. Perumahan dan Perlengkapan Rumah Tangga	2,10	2,60	0,93	1,25	2,76
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	3,67	2,83	-1,98	3,14	1,90
1.e. Transportasi dan Komunikasi	1,23	2,88	0,96	-2,14	4,78
1.f. Restoran dan Hotel	2,41	2,24	0,06	3,92	5,26
1.g. lainnya	2,95	1,54	6,14	2,69	6,02
2. Konsumsi LNPRT	2,21	2,46	1,64	3,21	6,66
3. Konsumsi Pemerintah	1,13	0,51	-0,40	2,25	1,70
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	4,66	3,90	0,01	1,02	3,24
PDRB PENGELUARAN	2,38	1,78	1,62	2,09	4,13

Catatan:

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN KENDAL**

Jl. Pramuka (Komplek Perkantoran) Kendal 51351
Telp. (0294) 381461, Fax. (0294) 383461
Email: bps3324@bps.go.id
Homepage: <http://kendalkab.bps.go.id>